



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BIREUEN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KAMPAR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BUTON SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BIAK NUMFOR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KAIMANA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2024**

**ACARA
Pemeriksaan Pendahuluan**

J A K A R T A

RABU, 15 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024
- Pemohon: Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin

PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024
- Pemohon: Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra

PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Aliadi dan La Ode Rusyamin

PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Hardodi dan La Ode Amiruddin

PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman

PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024
- Pemohon: Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho

PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- Pemohon: Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman

PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- Pemohon: Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor

PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024
- Pemohon: Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada

PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Egusem Piether dan Johan Christian Tallo

PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024
- Pemohon: Aleksander Walilo dan Ahim Helakombo

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 07.59 – 10.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dian Chusnul Chatimah
2. Abdul Basid Fuadi
3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari
4. Oly Viana Agustine
5. Achmad Dodi Haryadi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Maman Supriadi
2. Wahyu Pratama

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rico Febputra
2. Muhammad Rais Hasan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eka Rahmawati
2. La Ode Aliyudin

D. Pemohon Perkara Nomor 134/PHPU. BUP-XXIII/2025:

1. Faizal

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Hardodi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tony Akbar Hasibuan
2. Mulyadi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Febrina Aulya Rabbani
2. Zevi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228/PHPU. BUP-XXIII/2025:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Muhram
2. La Ode Isman Hardiansyah Bariun

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 254/PHPU. BUP-XXIII/2025:

1. M. Imam Nasef
2. Ahmad Matdoan

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Febri Diansyah
2. Tareq Muhammad Azis Elven

L. Pemohon Perkara Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Alexsander Walilo

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Pither Ponda Barany

N. Termohon:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Saiful Hadi | (KPU Kab. Bireuen) |
| 2. Andi Putra | (KPU Kab. Kampar) |
| 3. Hastun | (KPU Kab. Buton Selatan) |
| 4. Agusman | (KPU Kab. Buton Selatan) |
| 5. Hasrun | (KPU Kab. Konawe Kepulauan) |
| 6. Sri Wulandari | (KPU Kab. Konawe Kepulauan) |
| 7. Joey Nicolas Lawalata | (KPU Kab. Biak Numfor) |
| 8. Hubertus Bamulki | (KPU Kab. Pegunungan Bintang) |
| 9. Andhy Bresly A. Funu | (KPU Kab. TTS) |
| 10. Sofiaon Walilo | (KPU Kab. Yalimo) |

O. Kuasa Hukum Termohon:

1. Asman Siagian
2. Syarifuddin Paware
3. Robert Petrus
4. Adriansyah Abdullah
5. Erwin Dumas Hutagaol
6. Johanis H. Maturbongs
7. Anugrah Pata
8. Ahmad Syahroni Fadhil
9. James Simanjuntak

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Guntur Setiawan
2. Guntur Rambey

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nixon Lumaing
2. Moh. Fadly

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ardin Firanata
2. La Ode Zulfikar Nur

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bryan Umar
2. Randiman Madi

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Muhammad Dzul Fijar
2. Baron Harahap Saleh

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Budi Setyanto
2. Aan Sukirman

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Helmi

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yustina Haluk
2. Spei Yan Bidana

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Janwardisan Hernandika
2. Mahatir Muhammad Rahayaan

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fransisco Bernando Bessi
2. Eduard Markus

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Firmansyah
2. Kiky Saepudin

AA. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Syawir Abdullah | (Bawaslu Kab. Kampar) |
| 2. Mustaqim Akbar | (Bawaslu Kab. Kampar) |
| 3. Baharudin La Puka | (Bawaslu Kab. Buton Selatan) |
| 4. Irmawati | (Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan) |
| 5. Lidya Ingrid Wakum | (Bawaslu Kab. Biak Numfor) |
| 6. Yance Malo | (Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang) |
| 7. Abdul Malik Furu | (Bawaslu Kab. Kaimana) |
| 8. Siti Nurliah Indah Purwanti | (Bawaslu Kab. Kaimana) |
| 9. Amrunur Muh. Dawan | (Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur) |
| 10. Longginus Ulan | (Bawaslu Prov. Timor Tengah Selatan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai semua, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 12, 270, 29, 158, 80, 134, 143, 228, 244, 254, 275/PHPU Bupati Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Ini semuanya sudah kelihatan segar ini dengan caranya sendiri-sendiri. Perasaan segar Pemohon beda dengan Termohon dengan Pihak Terkait dengan Bawaslu. Yang penting kita hadapi event ini dengan gembira begitu, apa pun hasilnya. Toh urusan politik ini akan ada juga gilirannya tahun depan, 5 tahun lagi, dan segala macam. Tapi sebagai bagian dari hak konstitusional, semuanya tentu punya kesempatan untuk memperjuangkan nasibnya sendiri-sendiri.

Dan hari ini, kita sebagaimana biasanya tidak akan memperkenalkan masing-masing karena itu perlu waktu yang cukup lama, dan dari laporan tadi, pihak-pihak sudah pada hadir, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu.

Agenda persidangan kita pagi hari ini dari pukul 08.00 ini sampai nanti pukul 12.00 adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan Pemohon. Ini, sekarang ini waktu Pemohon, yang lain tidak boleh mengganggu. Interupsi dan segala macamnya itu ditahan dulu, nanti akan disediakan waktu di ujung untuk yang mau mengklarifikasi, mau bertanya, dan segala macamnya. Itu satu.

Yang kedua, Pemohon menyampaikan permohonan hanya pokok-pokoknya saja, maksimal masing-masing permohonan 15 menit. Maksimal masing-masing permohonan 15 menit. Berkait dengan permohonan itu, yang disampaikan pokok-pokoknya itu adalah apa yang dituliskan dalam permohonan yang diregistrasi, apakah yang diregistrasi itu permohonan awal, kalau tidak menyampaikan perbaikan permohonan atau permohonan perbaikannya lewat waktu atau kemudian yang diregistrasi itu adalah perbaikan permohonan. Jadi, yang disampaikan apa yang ada dalam Perbaikan Permohonan yang ditulis, tidak ada perbaikan karena waktu perbaikan sudah lewat.

Untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang akan dijawab oleh Termohon[*sic!*], itu apa yang tertulis dalam permohonan, begitu juga Pihak Terkait yang direspons yang tertulis dalam permohonan, begitu juga dengan Bawaslu. Nah, itu. Itu poin-poin yang harus diingat

oleh kita semua, supaya ini sidangnya berkepastian. Jadi, jangan lain yang disampaikan, lain yang ditulis dalam Permohonan Perbaikan atau permohonan yang diregistrasi.

Termohon akhir, ini penting untuk semua, fase ini harus dijadikan optimal untuk membuktikan, meskipun tidak pembuktian lanjut. Artinya, apa? Bukti-bukti semaksimal mungkin harus diserahkan ke Mahkamah. Karena apa? Belum pasti permohonan itu akan lanjut. Kalau lanjut, syukur kan, masih ada ruang untuk menambah bukti. Tapi kalau misalnya tidak lanjut, ya sekarang fasenya.

Jadi, serahkanlah bukti itu secara optimal, serahkan ke kami bukti itu, nanti ... nanti dalil dan bukti-bukti itu yang akan kami periksa dan kami akan memutus berdasarkan itu. Jadi enggak perlu juga perang opini di luar. Ribut pun ... apa namanya ... naik tanggal pun urat leher Saudara-Saudara, kalau bukti-buktinya tidak kuat, enggak ada manfaatnya. Jadi ini berbasis pada bukti, berbasis pada permohonan, berbasis pada bukti.

Nah, oleh karena itu, optimalkan bukti. Kalau Pemohon sudah menyerahkan bukti, kalau mau menambahkan, silakan, masih ada waktu sekarang dan sidang berikutnya. Termohon begitu juga, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Jadi diingatkan, coba kalau mau menambahkan bukti bagi Pemohon dan memasukkan bukti bagi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, diserahkan sebelum persidangan, agar kami memiliki waktu untuk memverifikasi bukti yang masuk itu. Bisa diverifikasi, bisa disahkan.

Nanti jangan di sidang berikutnya sudah mau selesai sidang, baru menyerahkan bukti, ya enggak ada waktu memverifikasi. Sehingga tidak bisa disahkan oleh Mahkamah. Artinya, bukti itu tidak akan bermanfaat banyak untuk permohonan yang diajukan, atau untuk jawaban yang diajukan, atau untuk keterangan yang disampaikan. Mudah-mudahan itu bisa dipahami.

Dan sekarang kita mulai, untuk yang pertama Kabupaten Bireuen. Silakan Kuasa Hukum, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [05:59]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [06:01]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [06:02]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Konstitusi yang kami muliakan.

Izin, Majelis. Kami langsung membacakan perbaikan yang telah kami sampaikan pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Dan izin juga kepada Majelis, kami juga nanti akan memberikan tambahan alat bukti, Majelis, untuk bukti surat (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [06:21]

Terkait dengan perpanjangan kartu, Majelis, ada (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Oke (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [06:24]

Satu orang.

Yang pertama, Majelis, terkait dengan identitas per ... Pemohon Murdani Yusuf, S.E., Abdul Muhaimin, S.Sos., merupakan Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Nomor Urut 1.

Dan kami lanjutkan, Majelis, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Kewenangan dianggap memiliki kewenangan, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [06:58]

Memiliki, Majelis.

11. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Ya (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [06:59]

Ya (...)

13. KETUA: SALDI ISRA. [07:00]

Lanjut.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:01]

Tenggat waktu (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Tenggat waktu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:02]

Izin, Majelis, bahwa keputusan komisi (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [07:03]

Memenuhi tenggat waktu atau tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:04]

Memenuhi, Majelis.

19. KETUA: SALDI ISRA [07:03]

Oke, lanjut.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:05]

Lanjut, Majelis, ke (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Legal standing?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:07]

Legal standing, Majelis. Juga memiliki legal standing, Majelis.
Dan kami lanjut ke Pokok Permohonan, Majelis.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:16]

Itu berapa pasang calon di Bireuen ... Kabupaten Bireuen?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:18]

Di Bireuen ada 3 pasangan calon, Majelis.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Saudara mewakili (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:21]

Ya (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [07:22]

Pasangan Calon Nomor 1, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:22]

Nomor Urut 1, Majelis.

28. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Berapa jumlah suara yang diraih?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:24]

Jumlah suara yang kami raih, Majelis, sebanyak=71.296 Majelis.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Yang menangnya Pasangan Nomor Urut 3, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:32]

Nomor Urut 3, ya, Majelis. Dengan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [07:33]

Berapa selisihnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:34]

Selisihnya=51.106, Majelis.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:38]

Oke=51.106.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:39]

Ya, Majelis.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:40]

Ini artinya lewat dari ambang batas, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:44]

Benar, Majelis, ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Oke, kalau mau melewati ambang batas untuk dikesampingkan ketentuan itu, apa dalil-dalil yang digunakan untuk menyampingkan (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:53]

Ya (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [07:54]

Pasal 158 itu? Silakan sampaikan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:55]

Baik, Majelis (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Ya (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [07:57]

Terkait dengan Permohonan kami, menyampingkan[*sic!*] Pasal 158] itu, Majelis. Yang pertama (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

Ini ada incumbent enggak, di sini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:03]

Ya, Majelis?

45. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Yang ada incumbent enggak yang ikut?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:06]

Incumbent enggak ada, Majelis.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:07]

Oh, enggak ada?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:08]

Eenggak ada, ya (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Oke, jadi pemain baru semua?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:10]

Ya, Majelis.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:12]

Terkait dengan penundaan Pasal 158. Yang pertama, Majelis, terkait dengan perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif, Majelis, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 3.

Yang kedua, juga terkait dengan ... kami masukkan dalam permohonan kami beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Ya, itu sudah. Kalau itu kan sudah.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:30]

Ya.

55. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Itu nanti biar kami yang menilai.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:32]

Baik, Majelis.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Sekarang dikemukakan saja, alasan kenapa kami harus mengenyampingkan Pasal 158 itu, itu yang dikemukakan. Silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:33]

Izin, Majelis, ya.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [08:34]

Yang pertama, tadi seperti kami sampaikan, Majelis, terkait dengan perbuatan TSM, Majelis, terstruktur, sistematis dan masif.

Yang kedua juga terkait dengan pemberlakuan per Bawaslu, Majelis, yang awalnya di Nomor 8 Tahun 2020 yang telah diubah, Majelis, di pasal ... apa Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, yang mana di Perbawaslu Nomor 8 itu di Pasal 10 huruf e, ayat (2) huruf e, itu yang awalnya itu ada mengatur tentang TSM, lalu ada perubahan di Pasal 9 ... di per Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 itu dihapus, Majelis, dan kembali ke pasal ... dan kembali ke per Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 terkait dengan TSM, itu dimulai dari saat pendaftaran sampai dengan pemungutan suara.

Namun, pada ... pada ... pada saat ini terkait dengan peraturan tersebut, di dalam ... apa namanya ... didalam peraturannya pengganti terkait dengan TSM tadi, di sini kami menilai bahwasannya ada kekosongan hukum, Majelis, terkait dengan TSM tadi. Karena ketika dihapus di pasal ... di Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Majelis, terkait dengan perubahan Nomor 8 Tahun 2020, maka kewenangan dari ... mungkin di Aceh itu ada namanya Panwasli, Majelis, untuk melakukan pemerintahan TSM, maka kami menilai ... apa namanya ... tindakan ... tindakan dari peraturan tersebut itu tidak mencerminkan ... apa namanya ... melakukan kekosongan hukum, namun bagi kami, untuk TSM sendiri karena tadi ada perubahan dari per Bawaslu, kami yakin itu kewenangan yang menjadi ... apa namanya ... menjadi apa namanya ... tujuan dari kami adalah untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Majelis.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:28]

Ya, ya kan sudah, ini sudah diajukan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [10:30]

Ya, Majelis.

63. KETUA: SALDI ISRA [10:30]

Yang ingin kami dengar itu mana yang TSM-nya itu? Yang terstrukturnya apa? Yang sistematisnya apa? Yang masifnya itu mana? Kalau itu yang harus dijelaskan, silakan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [10:30]

Baik, Majelis.
Terkait dengan terstruktur, Majelis (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [10:45]

Di dalam permohonan kami, Majelis, itu ada perbuatan, Majelis, yang dilakukan berhubungan dengan aparatur penyelenggara pemerintahan, Majelis, dan juga secara bersama-sama, di (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Di halaman berapa itu?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [10:45]

Di halaman 7, Majelis.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Nah, mana dia?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [10:45]

Di halaman 7, itu di Nomor 6, Majelis.

Di sini kami dadilkan terkait dengan bahwa Termohon pada saat rekrutmen PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara PPS di Kabupaten Bireun, pada tanggal 11 Mei 2024 dan tanggal 26 Mei 2024, adapun pelanggaran tersebut, Termohon meluluskan PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang pemberoleh nilai kelulusan tertinggi, melainkan meluluskan orang-orang yang terdekat dengan Termohon dan Paslon Nomor Urut 3, Majelis.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Ini ada buktinya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [11:29]

Ada, Majelis.

Bukti kami ini terkait dengan ini, dalil ini di P-298, di P-299, dan di P-300, Majelis.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Anda tahu enggak dalam seleksi itu, nilai salah satu komponen aja? Kan ada yang lain.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [11:41]

Ada, Majelis.

Ada kami buat perbandingan, Majelis (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [11:43]

Ya, ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [11:44]

Di salah satu, apa namanya? Salah satu calon, Majelis.

Jadi, ada lampiran, Majelis. Izin, Majelis, saya berikan contoh di P-299 kami, Majelis, yang telah kami ajukan ke Mahkamah.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:57]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [11:58]

Itu ada yang namanya Jarkasi, Majelis.

79. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:00]

Itu Nomor Urut 1 tertulis dengan nilai kelulusan itu sebanyak 53, Majelis. Namun di ... apa namanya ... di kelulusan, di pengumuman kelulusan, pada tanggal 14 Mei 2024, kami melihat di sini, Majelis, ada 5 orang yang atas nama Jarkasi yang mana tadi pada saat seleksi dia memiliki nilai tertinggi, namun pada saat penetapan hasil seleksi, nama Jarkasi tidak terdapat sebagai peserta ataupun sebagai anggota yang calon ini tadi yang lulus, Majelis (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Oke (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:33]

Karena ada 5 orang tadi (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Cukup, ya (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:34]

Ini tidak ada nama (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Cukup, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:35]

Ya, Majelis.

87. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Oke, biar nanti saya tanya ke apa ... ke (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:38]

Ke KIP.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Apa namanya di Aceh?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:40]

Di ... kita di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Majelis.

91. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Ya, ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:43]

Atau KPU, Majelis.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:44]

Ya, izin, Majelis.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:44]

Oke, nanti saya tanya, mengapa (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:46]

Baik.

97. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Yang rendah di ... apa (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:47]

Baik.

99. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Diloloskan, yang tinggi tidak.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:47]

Ya, Majelis.

101. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Oke, lanjut.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [12:51]

Lalu, terkait dengan yang kedua, Majelis, terkait dengan sistematis. Itu ada beberapa pelanggaran, Majelis, yang memang sudah direncanakan sangat matang, Majelis, terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pihak Terkait, Majelis. Dan bukti ini kami dukung dengan Bukti P-298, P-299, P-300, P-301, P-305, P-309, P-312, dan P-319, Majelis (...)

103. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Oke.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:15]

Terkait dengan pembuatan sistematis, Majelis.

105. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Apa itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:18]

Ya.

107. KETUA: SALDI ISRA [13:19]

Apa yang sistematis?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:21]

Ya, Majelis.

109. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Nah, lanjut.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:22]

Jadi, ada ... ada foto-foto, Majelis, yang kami ... kami lampirkan, Majelis. Contohnya, Majelis, di Bukti P-3 (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Foto apa itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:29]

Foto, ini, Majelis. Foto antara ... apa namanya ... kepala desa, Majelis. Foto ... foto kepala desa itu di bukti kami, Majelis, di P-303.

113. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

Foto kepala desa itu kenapa?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:45]

Ya.

115. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Ceritakan. Ndak, Anda ceritakan saja (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:49]

Ya, Majelis.

117. KETUA: SALDI ISRA [13:50]

Apa yang terjadi dengan foto itu?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [13:50]

Ya. Jadi, di sini, Majelis, ada beberapa foto, Majelis, di ... apa namanya ... di Bukti kami, Majelis. Ada ... ada memang dari awal memang perbuatan terkait dengan pelanggaran sistematis ini sudah direncanakan sebelum tahapan pilkada dimulai, Majelis.

119. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Oke.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:05]

Jadi ... jadi memang (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [14:07]

Foto itu kapan kejadiannya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:08]

Kejadiannya, Majelis, ini ... sebentar, Majelis.
Izin, Majelis, ini enggak kami buat tanggal ininya, Majelis.

123. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Oke.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:28]

Ya, tapi ada beberapa bukti, Majelis, terkait dengan (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [14:31]

Pokoknya pada suatu waktulah, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:32]

Ya, Majelis.

127. KETUA: SALDI ISRA [14:33]

Di tahun 2024.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:35]

2024, Majelis, ya.

129. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Silakan lanjut.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:36]

Ya.

131. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Apa lagi?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:38]

Lanjut, Majelis. Ke perbuatan masif, Majelis. Terkait dengan Perbuatan yang apa ... yang dilakukan, Majelis. Ini yang kami dalilkan adalah terkait dengan money politics, Majelis, atau politik uang.

133. KETUA: SALDI ISRA [14:47]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:47]

Yang kami masukkan ke dalam Permohonan dan didukung oleh bukti kami juga, Majelis, Bukti P-295, P-297, P-302, P-318, P-328 (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [14:55]

Itu seberapa masif?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:56]

Ya, Majelis.

137. KETUA: SALDI ISRA [14:57]

Semua orang menerima duit?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [14:59]

Hampir semua ... ya, Majelis. Semua orang, Majelis. Karena kami memberikan satu buah bukti juga, Majelis, di kecamatan ... apa namanya ini, Kecamatan Jangka, Majelis, itu ada sejumlah orang, itu yang telah terkoordinir, Majelis. Sebanyak (...)

139. KETUA: SALDI ISRA [15:13]

Berapa orang?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [15:15]

2.889. Majelis, dengan jumlah uang 288.900 ... Rp288.900.000,00, Majelis, dengan pecah Rp100.000,00 dan juga kami telah melaporkan ke Panwasli, Majelis, terkait dengan perbuatan ini, Majelis. Tapi ini yang di ... di satu lagi, di Kecamatan Makmur (...)

141. KETUA: SALDI ISRA [15:31]

Tapi duitnya ditangkap?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [15:32]

Untuk yang ini tidak, Majelis. Tapi yang ada di Kecamatan Makmur, Majelis.

143. KETUA: SALDI ISRA [15:35]

Apanya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [15:35]

Kecamatan Makmur, Majelis, di Bukti Nomor 329, Majelis. Berupa putusan, Majelis, dari Pengadilan Negeri Bireuen.

145. KETUA: SALDI ISRA [15:42]

Ya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [15:42]

Itu ada bukti sebanyak Rp300.000,00, Majelis dengan jumlah pecahan Rp50.000,00, dikali 6, Majelis, dan sampai dengan sekarang prosesnya masih banding, Majelis.

147. KETUA: SALDI ISRA [15:52]

Oke, berarti ada 6 orang ya, yang menerima, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [15:53]

Ya, ada beberapa orang, Majelis. Ini untuk Perkara yang di Makmur ini, Majelis dalam salah satu Kecamatan di Bireuen, ini masih proses banding, namun di putusan di PN Bireuen, itu terbukti dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dan jaksa sedang mengajukan banding, Majelis, di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

149. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Oke, apa lagi? Kalau enggak ada, lanjut Petitum saja.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [16:14]

Baik, Majelis.
Izin kami lanjut ke Petitum, Majelis.

151. KETUA: SALDI ISRA [16:20]

Ya.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [16:21]

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah atau tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara di tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Jeumpa.
4. Menyatakan tidak sah dan batal atas penetapan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut 3, H. Mukhlis, S.T., Ir. H. Razuardi, M.T., atas perolehan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Berita Acara tanggal 2 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

Yang kelima, Majelis.

5. Memerintahkan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Jeumpa. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen atau untuk segera melaksanakan keputusan ini. Atau menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum atau KIP Kabupaten Bireuen melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bireuen Tahun 2024 khususnya di 8 kecamatan, di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Jeumpa.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Majelis, Kuasa Hukum Pemohon, Azhari, S.Sy., M.H., CPM., Zulfikar Muhammad, S.H., M.H., Maman Supradi, S.HI., M.H., dan Wahyu Pratama, S.H.

Izin.

153. KETUA: SALDI ISRA [18:24]

Oke. Berapa kecamatan jumlahnya di (...)

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:26]

Ada ... kalau seluruhnya ada 17, Majelis.

155. KETUA: SALDI ISRA [18:29]

Jadi, yang Anda minta sekarang di 8 saja, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:31]

Ya, di 8 kecamatan, Majelis. Izin, Majelis, kami ingin juga (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [18:35]

Sabar dulu.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:36]

Ya.

159. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Jangan buru-buru pertanyaan saya dijawab. Berapa jumlah kecamatan?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:41]

17, Majelis.

161. KETUA: SALDI ISRA [18:42]

17.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:43]

Ya.

163. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Ini pelan-pelan, ya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:45]

Ya, Majelis.

165. KETUA: SALDI ISRA [18:46]

Yang Anda minta 8, kan?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:47]

8 kecamatan, ya.

167. KETUA: SALDI ISRA [18:48]

Berarti 9 nya tidak?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:50]

Ya.

169. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Oke, apa yang mau disampaikan?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:54]

Ya, jadi terkait dengan massif, Majelis, kami juga (...)

171. KETUA: SALDI ISRA [18:56]

Oh, sudah selesai itu.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [18:58]

Eenggak, ini sedikit saja, Majelis.

173. KETUA: SALDI ISRA [18:59]

Apa lagi?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:00] I

Ya, jadi ada total TPS, Majelis.

175. KETUA: SALDI ISRA [19:02]

Ya.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:03]

Sebanyak 823 yang masuk ke 8 kecamatan. Ini Majelis, lebih dari setengah TPS yang ada di Kabupaten Bireuen, yaitu berjumlah 487 TPS, Majelis.

177. KETUA: SALDI ISRA [19:14]

Oke.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:15]

Ya.

179. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Oke. Cukup?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:16]

Cukup, Majelis.

181. KETUA: SALDI ISRA [19:17]

Jangan buru-buru.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:18]

Ya.

183. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Santai saja. Alon-alon, gitu.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:20]

Siap, Majelis.

185. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Tahu alon-alon?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:22]

Pelan-pelan.

187. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Kalau kata orang Indonesia itu pelan-pelan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:25]

Ya, Majelis.

189. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Kalau kata orang Padang, lambek-lambek katanya. Lambat-lambat, enggak usah buru-buru.

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Arsul?

190. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:36]

Ya, Kuasa Pemohon. Ini basis permohonan Anda kan TSM?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:40] I

Ya, Majelis.

192. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:41]

Ya. Pertama tadi saya dengar dan juga saya baca dalam permohonan Anda soal rekrutmen PPK dan PPS.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:51]

Ya.

194. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:52]

Di Kabupaten Bireuen.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:53]

Ya, Majelis.

196. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:54]

Ini semua atau hanya beberapa saja? Tadi kan dibidang 17 kecamatan.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [19:57] [19:58]

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:59]

Ya. Yang itu tadi, tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tinggi, satu ... satu orang saja atau semuanya begitu?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:07]

Ada di beberapa kecamatan, Majelis.

200. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:09]

Beberapa kecamatan, itu apa saja?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:11]

Ya, yang tadi yang pertama kami bacakan di Ganda Pura, Majelis.

202. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:15]

Ya, mana lagi? Gimana ini enggak hafal? Harus hafal, gitu, semua yang Anda tulis itu harus ada di kepala. Jadi kalau menjawab itu, langsung, tidak pakai jeda.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:30]

Ya, tadi yang pertama di Ganda Pura, Majelis.

204. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:34]

Ya, mana lagi?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:35]

Yang kedua.

206. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:43]

Ya sudah, kelamaan.
Kedua, pertanyaannya (...)

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:45]

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:46]

Atas peristiwa ini, Anda ajukan protes enggak atau pengaduan?
Ke Bawaslu, ke DKPP?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:52]

Ya, ada ini, Majelis, ada ... apa namanya ... bukti surat (ucapan tidak terdengar jelas), Majelis.

210. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:53]

Surat apa?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [20:56]

Surat ke ... panwaslu juga ada, Majelis, panwaslu (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

212. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:59]

Ya, pengaduan?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [21:00]

Ya.

214. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:01]

Ya, nanti kita tanya Bawaslunya, ya.

Yang kedua, Anda bilang ini ... ini melanggar kesepakatan bersama waktu tahapan uji mampu baca Al-Qur'an. Apa ini pelanggarannya? Kalau bikin dalil ini, harus yang jelas, itu.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [21:19]

Izin, Majelis, dijelaskan rekan kami, Majelis.

216. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:20]

Ya, silakan. Apa?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [21:26]

Baik, izin, Yang Mulia.

Saya jelaskan mengenai dalil poin 7 tadi. Menerangkan awalnya sudah ada kesepakatan antarpihak bahwa proses pengajian yang diselenggarakan oleh KIP itu menggunakan alat pengeras, Yang Mulia. Namun faktanya, pada saat dilakukan, itu mengabaikan kesepakatan yang sudah disepakatinya.

218. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:47]

Jadi, soalnya ... soal alat pengeras saja ini, enggak pakai?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [21:51]

Siap, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:52]

Oke, terus ... itu tadi, kembali ke yang pertama, PPK dan PPS yang direkrut dengan cara melanggar itu, bertindak berat sebelah, enggak? Adil atau enggak? Jangan-jangan itu melanggar, tetapi dia dalam menjalankan tugas tetap adil, tetap imparsial, begitu. Begitu, enggak?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [22:15]

Ya, Majelis, kalau terkait dengan itu (...)

222. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:15]

Ya ... ya ini itu apa?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [22:20]

Ya. Karena kan, kami kan mendalilkan 8 kecamatan, Majelis, yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, Majelis.

224. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:24]

Lah ya, apa bentuknya? Konkretnya apa? Karena orangnya itu direkrut dengan pilih ka sih, maka dia bela calon nomor sekian. Itu apa bentuknya? Ada, enggak? Jangan membuat-buat! Kalau enggak ada, harus katakan enggak ada. Fair itu namanya.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [22:40]

Ya, kalau dari bentuk, Majelis, kan kami mendalilkan terkait dengan money politics, Majelis. Terkait dengan money politics.

226. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:45]

Ya, money politics, yang melakukan siapa? PPK dan PPS-nya?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [22:47]

Ini ... ini enggak, Majelis, ini bukan mereka (...)

228. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:49]

Kan saya tadi lagi tanya, PPK dan PPS-nya itu setelah dipilih, dilantik, kemudian selama proses itu, ya setelah dia menjabat itu, ada melakukan perbuatan yang enggak adil, enggak? Atau yang melanggar undang-undang? Atau melanggar etik?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [23:02]

Ada beberapa juga, Majelis.

230. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:06]

Ada beberapa apa?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [23:09]

Apa namanya ... bukan ... bukan dari ini, ya, Majelis. Ini ada yang nomor 11, Majelis. Halaman 8 (...)

232. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:15]

Ada nomor 9. Itu ... apa ... itu di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota ... kan ada 17 kecamatan tadi.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [23:23]

Nomor 9, halaman 7.

234. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:25]

Ya, satu desa?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [23:25]

Ya.

236. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:28]

Ini, saya sengaja tanya agak ini, supaya Pemohon yang lain itu juga nanti bisa mempelajari bahwa kalau ditanya itu, harus cepat. Kalau Anda masuk ke dalam ruangan ini, Anda tidak kuasai ya, persoalan yang Anda ajukan, ya, mesti membaca-baca dulu, gitu ya. Ya, saya kira, itu mesti lain kali harus diperbaiki, gitu ya.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [23:28]

Ya.

238. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:54]

Saya katakan, saya pernah duduk di tempat Anda dan di tempat Pihak Terkait. Jadi harus tahu Persis gitu ya, kalau kita itu harus menguasai dan jawabannya harus short and punchy, harus pendek dan menyangat, jangan muter-muter.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [24:10]

Ya. Kami juga izin, Majelis. Terkait dengan tadi pertanyaan, Majelis. ada kami buktikan di P-307, Majelis.

240. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:17]

Oke, ya. Karena ini TSM, kalau TSM itu ya kita akan nilai nanti massifitasnya seberapa besar, begitu.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [24:25]

Ya, baik, Majelis.

242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:27]

Ya, begitu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

243. KETUA: SALDI ISRA [24:30]

Terima kasih, Pak Ridwan.

244. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Ketua Panel.
Saudara Pemohon, ya?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [24:38]

Ya.

246. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:38]

Nah, ini kan didalil Saudara ini, tentang kesalahan penghitungan, banyak terjadi kesalahan penghitungan gitu kan di se-kabupaten gitu, di tingkat kabupaten. Bahkan juga Saudara juga mendalilkan penghitungan suara di 17 kecamatan itu yang menurut Saudara dilakukan oleh Termohon.

Karena Saudara tidak merefer dengan bukti-bukti di sini ya, tidak nomor. Nah, angka bukti pun belum ada di sini. Jadi, di sini kan sudah ada keberatan dari dalil Saudara ini, dari saksi itu. Apa tindak lanjut keberatan seperti apa yang di situ? Karena tidak diuraikan di sini jumlahnya tidak diuraikan, yang Saudara keliru itu, kemudian juga tidak jelas argumentasi mengenai kesalahannya itu. Apa yang dilakukan, keberatan ini seperti apa?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [25:34]

Yang terkait dengan keberatan, Majelis.

248. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:37]

Ya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [25:37]

Ada laporan, Majelis, yang telah kami sampaikan ke Panwaslih Bireuen, Majelis (...)

250. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:38]

Ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [25:39]

Di P-313[*sic!*], Majelis.

252. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:48]

Ada bukti-buktinya itu nanti ya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [25:49]

Ya, Majelis.

254. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:50]

Ya, Saudara isi blanko itu, keberatannya itu?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [25:53]

Ya, blanko (...)

256. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:54]

Atau hanya lisan saja?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:00]

Ini blanko tanda bukti penyampaian laporan di Panwaslih Bireuen, Majelis.

258. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:01]

Ya.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:01]

Ada juga di P-314 terkait dengan pemberitahuan tentang status laporan dari Panwaslih Bireuen, dan kami juga ada laporkan ke Panwaslih Aceh, Majelis, di Bukti 3315, Majelis.

260. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:14]

Ya. Saksi yang mengajukan itu?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:16]

Yang mengajukan bukan saksi, Majelis.

262. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:20]

Karena di dalil Sudara ini saksi-saksi?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:23]

Ya, maksudnya saksi ini, Majelis. Dari ... apa Namanya (...)

264. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:26]

TPS?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:26]

Nama M.Yunus.

266. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:29]

Ya, ya. Saksi.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:34]

Ya, 1 lagi (...)

268. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:34]

Mereka tanda tangan saksi itu?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:37]

Di (...)

270. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:40]

Tanda tangan enggak? Terhadap hasil yang menurut Saudara kesalahan penghitungan banyak itu?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [26:44]

Izin, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:45]

Ya.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [26:45]

Mengenai keberatan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, seluruh saksi di 8 kecamatan ini keberatan, dan di tingkat kabupaten juga kita menolak hasilnya.

274. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:58]

Menolak?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYU PRATAMA [26:58]

Menolak.

276. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:59]

Oh, tidak menandatangani?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [27:00]

Tidak menandatangani.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:03]

Tidak menandatangani. Ya, karena di uraian Saudara ini kan lebih banyak mendalilkan tentang kesalahan penghitungan. Tapi, Saudara di dalam uraian ini lebih banyak mendalilkan tentang apa yang dilakukan oleh paslon lain dan juga Termohon di sini, ya. TSM-nya malah yang malah diuraikan seperti dalil yang utamanya ini kesalahan penghitungan dengan sengaja yang Saudara ada di sini. Nanti di refer bukti-buktinya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [27:30]

Baik, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [27:34]

Cukup. Cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [27:34]

Cukup, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [27:35]

Terima kasih.

Sekarang kita masuk ke Perkara 270. Ada?

Saya mau tanya dulu. Ini Permohonan Saudara ditandatangani oleh Kuasa Hukum atau ada yang menandatangani?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIS ELVEN [27:52]

Tandatangani Kuasa Hukum, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [27:55]

Semuanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIS ELVEN [27:56]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [27:56]

Betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIS ELVEN [27:57]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Nanti kalau terbukti, tidak. Jadi masalah, ya

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIS ELVEN [31:29]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Ini saya coba ini ... apa ... lihat tarikan-tarikan penandatanganannya, tapi nanti biarlah ini jadi soal lain. Silakan, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [28:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami, membacakan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon Perkara Nomor 270.

KETUA: SALDI ISRA [28:30]

Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [28:31]

Kami mewakili, Egusem Pieter Tahun dan Johan Christian Tallo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan Nomor Urut 4.

KETUA: SALDI ISRA [28:44]

Oke, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [28:46]

Izin, Yang Mulia. Kami minta izin untuk menampilkan Power Point.

KETUA: SALDI ISRA [28:49]

Yang Power Point sama dengan yang disampaikan di sini, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [28:52]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [28:53]

Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [28:54]

Baik, lanjut. Baiklah.

Pada pembacaan Pokok-Pokok Permohonan kali ini, ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan.

Yang pertama, lanjut. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [29:12]

Ya, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [29:12]

Kemudian terkait dengan Tenggang Waktu.

KETUA: SALDI ISRA [29:16]

Memenuhi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [29:20]

Baik, untuk objek permohonan, ini ditetapkan pada Hari Jumat ... tanggal (...)

KETUA: SALDI ISRA [29:18]

Oke, enggak usah di uraikan itu. Cukup, ya, memenuhi Tenggang Waktu, ya? Kan mau menyampaikan itu. Ya, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [29:30]

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [29:30]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [29:44]

Next, mohon dilanjut. Dilanjut lagi. Baik, lanjut.

Baik, untuk Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) juga dianggap ... mohon dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [29:49]

Ini melewati 158, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [29:52]

Melewati 158, namun mohon di ... pada prinsipnya kami memohon untuk ambang batas dikecualikan.

KETUA: SALDI ISRA [29:59]

Ya, silakan. Apa alasannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [30:04]

Baik, untuk ... kami memohon untuk Pasal 158 dikecualikan karena adanya 3 dalil utama yang kami argumentasikan di sini, Yang Mulia.

Yang pertama, adanya praktik money politics yang dilakukan oleh Paslon 5 dan Paslon 1 untuk memena ... mempengaruhi suara pemilih.

Kemudian, untuk dalil yang kedua, adanya kelalaian Termohon meloloskan narapidana tindak pidana korupsi sebagai Calon Bupati.

KETUA: SALDI ISRA [30:29]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [30:29]

Itu untuk Paslon (...)

KETUA: SALDI ISRA [30:31]

Itu dihukum berapa tahun? Kapan kejadiannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [30:34]

Kejadiannya untuk Putusan ... untuk Putusan Pengadilannya tahun 2017 dan inkrahnya pada tahun 2018, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [30:44]

2017. Oke, kejadiannya 7 ribu ... 2017, inkrahnya 2018.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [30:56]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [30:57]

2018, dia dihukum berapa tahun?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [30:59]

Dihukum 1 tahun, Yang Mulia, namun ancaman hukumannya di atas 5 tahun.

KETUA: SALDI ISRA [31:04]

Ancaman hukumannya di atas 5 tahun, berarti dia (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [31:05]

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

KETUA: SALDI ISRA [31:08]

Ya, tahun berapa dia keluar tahanan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [31:09]

Tahun 2018, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [31:11]

2018. Sekarang 2024/25, sudah 6 tahun. Apanya masalah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [31:18]

Betul, Yang Mulia. Terkait kelalaian Termohon ini, kami ... baik.

KETUA: SALDI ISRA [31:27]

Apa yang lalai, Termohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [31:29]

Jadi, ketika diajukannya syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, ada salah satu syarat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada Putusan 12 Tahun 2003

KETUA: SALDI ISRA [31:42]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [31:43]

Adanya ketentuan bahwa dalam ... Maaf, maaf. Izin saya bacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [31:53]

Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [31:54]

Mahkamah berpendapat di dalam Pasal ... di dalam Putusan 12 Tahun 2003 dimana memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Nah, kami mempermasalahkan mengenai adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati diri calon bupati ini sebagai mantan terpidana.

KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Apa yang tidak jujur?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [32:00]

Fakta yang kami temukan adalah Salmun Tabun sebagai Paslon 1 dalam memenuhi persyaratan menjadi Calon Bupati Timur Tengah Selatan tidak melakukan pengumuman melalui media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Sebelumnya kami sudah ... diajukannya surat pengaduan terkait dugaan pelanggaran administrasi kode etik dan pidana oleh Salmun Tabun.

Kemudian, berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi tersebut, ditemukan bahwa fakta media dimana Salmun Tabun me ... mengumumkan hal tersebut tidak terifikasi oleh ... terverifikasi oleh Dewan Pers secara nasional. Media tersebut kami temukan di sini beralamat flobamoranius.com. Setelah kami cek itu benar-benar tidak terverifikasi oleh Dewan Pers nasional, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Itu syarat terverifikasi Dewan Pers nasional itu di mana? Ada enggak syarat seperti itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [33:24]

Di pasal ... izin, Yang Mulia. Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 juncto Juknis KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [33:38]

Oke, lanjut.

Jadi, yang ... yang ... apa itu ... yang tidak memenuhi syarat itu Pasangan Calon Nomor 1, ya? Bukan yang menang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [33:51]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [33:51]

Lalu, oke. Kenapa yang pasangan calon yang lain minta didiskualifikasi juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [33:57]

Karena berdasarkan dugaan kami, berdasarkan ketiga dalil ini, baik Paslon 5 maupun Paslon 1 itu mempengaruhi perolehan suara dari paslon kami, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [34:08]

Ya, alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon 5 apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [34:13]

Adanya dugaan kuat terkait money politics dan juga keterlibatan ASN untuk memenangkan Paslon 5 dan juga Paslon 1, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [34:21]

Oke, terus? Apalagi yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [34:28]

Mungkin lanjut saja ke poin yang ketiga, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [34:31]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [34:31]

Terkait dalil kami yang ketiga mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan tindakan Termohon yang menghalangi partisipasi pemilih, serta ketidakprofesionalan Termohon yang berkonsekuensi PSU pada Pemilukada TTS yang berdampak pada perolehan suara Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [34:49]

Oke, apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [34:49]

Yang pertama, adanya fakta yang sangat terang. Yakni adanya aktivitas dari beberapa oknum ASN dari TTS yang secara tidak langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, salah satunya Paslon 1, sebagaimana dapat dilihat dengan tanda kode saat berfoto dan menunjukkan ... dimana dalam foto tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial TTS.

KETUA: SALDI ISRA [35:16]

Oke, apa kodenya? 5 atau 2 atau 1?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:17]

1.

KETUA: SALDI ISRA [35:20]

Bearti dia mendukung Pasangan Calon Nomor 1?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:21]

Mendukung Paslon 1. Itu ada di Bukti P-16, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [35:23]

Oke, lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:25]

Kemudian untuk (...)

KETUA: SALDI ISRA [35:26]

Tapi yang menangnya kan bukan Nomor 1, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:28]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [35:28]

Apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:29]

Kemudian, aktivitas ini juga ditunjukkan oleh pendukung Paslon Nomor 5, dimana aktivitas melanggar tersebut tidak bisa dianggap terbatas pada deklarasi dukungan saja, namun secara otomatis turut mengajak publik atau orang lain juga ikut mendukung dan mencoblos Pasangan Nomor 5.

KETUA: SALDI ISRA [35:49]

Oke, jadi ASN itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:51]

Dimana kejadian ini (...)

KETUA: SALDI ISRA [35:52]

ASN itu ada yang pakai angka 1 begini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:55]

Betul.

KETUA: SALDI ISRA [35:55]

Ada yang angka 5 begini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [35:57]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [35:57]

Oke, apa lagi? ...

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:00]

Itu saja, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [36:02]

Ada, enggak kejadian-kejadian itu dilaporkan ke Bawaslu?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:04]

Ada, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [36:05]

Laporannya berapa kali?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:09]

Satu kali, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Yang dilaporkan Nomor 1 atau Nomor 5?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:17]

Dilaporkan keduanya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Keduanya. Apa isi laporannya?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:21]

Laporannya tidak diregistrasi, Yang Mulia.

286. KETUA: SALDI ISRA [36:24]

Tidak diregistrasi. Alasan ke Bawaslu apa?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:27]

Tidak memenuhi syarat dan kurangnya bukti, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA

Tidak memenuhi syarat dan kurangnya bukti, ya. Nanti saya tanya ke Bawaslu. Ada lagi? Cukup?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:37]

Cukup, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [36:38]

Langsung Petitem.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [36:45]

Baik, Yang Mulia.

Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe-Johny Army Konay, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka di Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuantana.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024 sebagai berikut.
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [38:07]

Itu di Timor Tengah Selatan itu berapa kecamatan semua?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [37:12]

Ada 32 kecamatan, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [37:13]

Tapi yang diminta dibatalkan cuma di 1, 2, 3, 4 kecamatan, ya?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [37:19]

Betul, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [37:20]

4 kecamatan, oke. Lanjut.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [37:24]

Empat (...)

296. KETUA: SALDI ISRA [37:25]

Petitum berikutnya.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [37:25]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe-Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe-Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan nomor ... mohon maaf, Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024 sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan Tahun 2024 di seluruh tempat pemungutan suara

Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuanana tanpa ke ikut sertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe, Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini ditetapkan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

298. KETUA: SALDI ISRA [41:06]

Oke. Terima kasih.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:06]

Demikian, Pokok Permohonan ... Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [41:08]

Cukup, ya?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:10]

Cukup, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [41:10]

Ini ada 2 tanggal, tanggal 6 Desember dan tanggal 7, ya? Itu yang digunakan sebagai batas akhir untuk mendaftarkan tanggal 6 atau tanggal 7?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:20]

Kita gunakan pengumuman tanggal 7, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [41:23]

Tanggal 7?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:24]

Betul, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Tanggal 7 itu hari apa, ya? Sabtu. Berarti hitungannya Senin, Selasa, Rabu. Hari apa dimasukkan permohonan?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:34]

Hari Rabu, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [41:36]

Hari Rabu, ya?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:36]

Betul.

309. KETUA: SALDI ISRA [41:38]

Kalau tanggal 6 hari?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:40]

Tanggal 6 hari Jumat.

311. KETUA: SALDI ISRA [41:42]

Hari Jumat, kalau hari Jumat kan Jumat, Senin, Selasa, ya?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [41:44]

Betul, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [41:45]

KPU Timur Tengah Selatan, mana? Kapan Anda tetapkan itu?

314. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [41:53]

Tanggal 6 Desember 2024.

315. KETUA: SALDI ISRA [41:56]

Kenapa Anda pisahkan pengumuman dengan penetapan?

316. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [42:00]

Karena berdasarkan PKPU, jadwalnya itu untuk pengumumannya setelah penetapan.

317. KETUA: SALDI ISRA [42:07]

Anda ikuti ndak apa yang dinyatakan ... yang disampaikan KPU? Bahwa tanggal penetapan itu sekaligus tanggal pengumuman, Anda ikuti tidak?

318. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [42:20]

Ikutu ... Ikuti.

319. KETUA: SALDI ISRA [42:22]

Jadi kenapa dibedakan antara tanggal 6 dan tanggal 7?

320. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [42:24]

Karena penetapannya itu pada pukul 23.55.

321. KETUA: SALDI ISRA [42:29]

Terus?

322. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [42:31]

Jadi pengumumannya di tanggal 7.

323. KETUA: SALDI ISRA [42:34]

Anda tahu enggak? Walaupun 23.55 lalu beda 5-6 menit itu satu hari loh. Ini bisa menyebabkan Pemohon tidak memenuhi tenggat waktu gara-gara itu. Karena itu kami sudah sampaikan kepada KPU dan itu

hampir KPU seperti itu semua, tanggal penetapan itu sekaligus tanggal pengumuman. Jadi, patokan yang kami gunakan di Mahkamah itu tanggal penetapan, itu harus.

Jadi, kalau Anda melakukan kesalahan biar Anda dihukumlah karena tidak ... tidak apa ... mene ... mene ... mene ... memenuhi ketentuan, gitu semuanya.

324. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [43:00]

Ya.

325. KETUA: SALDI ISRA [43:04]

Saya bisa tanya KPU lain, di diktum tiganya, di penetapan itu sekaligus pengumuman. Jadi, ketika diketokan palu itu sekaligus ketika itu dianggap sebagai pengumuman.

Nanti Anda jelaskan, Anda kan mau bikin jawaban. Ya?

326. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [43:33]

Baik.

327. KETUA: SALDI ISRA [43:34]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau sampaikan Yang Mulia Pak Arsul?

328. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:39]

Ya, ini KPU, ya. Saya tanya, juga waktu penetapan ada ini kedua perwakilan atau bahkan pasangan ... apa ... semua pasangan calon lima itu? Waktu penetapan tanggal 6, kan itu dalam rapat pleno, kan? Siapa saja yang hadir?

329. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:04]

Yang hadir itu dari saksi.

330. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:07]

Saksi?

331. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:08]

Saksi.

332. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:08]

Ya.

333. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:09]

Ya.

334. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:10]

Saksi yang wakili pasangan calon (...)

335. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:10]

Ya.

336. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:11]

Lima-limanya hadir?

337. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:13]

Hanya tiga.

338. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:14]

Hanya tiga?

339. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:14]

Hanya tiga pasangan calon.

340. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:15]

Oke. Bawaslu hadir juga?

341. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:18]

Hadir.

342. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:19]

Hadir, ya. Oke. Terus ... dan itu dalam Rapat Pleno terbuka?

343. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [44:18]

Ya.

344. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:27]

Oke, baik.

Ini sekali lagi pada Pemohon, ya. Ini tanda tangan di Surat Kuasa dan ini ditandatangani oleh orang yang ... orang yang bersangkutan ya, bukan scan, ya?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [44:48]

Betul, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:49]

Betul?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [44:49]

Betul, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:50]

Bukan juga ditandatangani oleh orang lain?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [44:54]

Betul, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:55]

Ini serius lho konsekuensinya ya, serius lho.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [44:59]

Baik, Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:02]

Karena kalau tidak benar itu tindak pidana.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [45:06]

Baik, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:08]

Dan tindak pidana bukan aduan lho, soal tanda tangan ini.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [45:10]

Baik, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:13]

Gitu, oke.

Ini pasangan Anda Nomor 3, ya? Karena itu yang Anda minta diskualifikasi ... maksudnya Nomor 3 perolehan suaranya itu adalah yang di atasnya, dua-duanya?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [45:29]

Betul, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:30]

Ya, dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan ya dalam Permohonan.

Oke, saya kira catatan saya itu, ya. Samalah soal jangka waktu dan soal tanda tangan di Permohonan ini, ya.

359. KETUA: SALDI ISRA [45:45]

Begini, nanti (...)

360. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:45]

Oke, terima kasih.

361. KETUA: SALDI ISRA [45:46]

Ya. Sudah, Yang Mulia?

Nanti di sidang berikutnya semua Kuasa Hukum diminta hadir di ruangan ini dan tanda tangan di depan saya, di depan Mahkamah, ya.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [45:54]

Baik, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [45:54]

Semua, besok kita mau lihat itu tanda tangannya, benar dia yang tanda tangan atau tidak, ya?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [45:59]

Baik, Yang Mulia.

365. KETUA: SALDI ISRA [46:00]

Di sidang berikutnya.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [46:01]

Baik, Yang Mulia.

367. KETUA: SALDI ISRA [46:02]

Oke. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Karena kita khawatir, ada juga yang bukan bersangkutan tanda tangan, begitu.

Sekarang Perkara Nomor 29.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [46:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [46:21]

29 adalah Kabupaten Kampar?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [46:25]

Siap, Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Silakan.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [46:28]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

373. KETUA: SALDI ISRA [46:29]

Walaikumsalam wr. wb.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [46:34]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Kami merupakan Kuasa Hukum dari H. Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024.

Tentang Kewenangan Mahkamah karena ini merupakan Permohonan pembatalan keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar, maka kami anggap ini merupakan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Tentang Tenggang Waktu. Objek sengketa ditetapkan tanggal 3 Desember, hari Selasa, pukul 00.06 WIB, sedangkan Permohonan diajukan pada tanggal 5 Desember 2024, perbaikannya kami ajukan pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 22.08 ... menit ke 48 WIB.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon merupakan salah satu pasangan calon wakil bupati dan ... Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 120.693 suara.

375. KETUA: SALDI ISRA [48:07]

Yang ini empat pasangan calon di situ, ya?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:09]

Ya, Yang Mulia.

377. KETUA: SALDI ISRA [48:10]

Yang peraih suara terbanyaknya pasangan berapa?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:12]

Paslon ... Pasangan Nomor Urut 3, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [48:14]

Oke. Saudara ini mewakili Nomor Urut 4, ya?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:16]

Ya, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [48:17]

Nomor Urut 4, selisihnya sekitar 6.000-an 800-an, ya?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:19]

6.000 ... ya ... 6.800, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [48:21]

Oke. Terus apa yang mau dijelaskan?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:23]

Terkait dengan ambang batas yang disebutkan dengan Pasal 158, kami mohon kepada Yang Mulia untuk menunda keberlakuan Pasal

tersebut karena kami menemukan fakta-fakta adanya tindakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Yang (...)

385. KETUA: SALDI ISRA [48:41]

Ini Ahmad Yuzar ini incumbent?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:42]

Beliau ini adalah mantan sekretaris daerah pada saat pendaftaran, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [48:45]

Mantan sekretaris daerah. Incumbent ada yang ikut?

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:47]

Incumbent tidak ada, Yang Mulia.

389. KETUA: SALDI ISRA [48:48]

Ini pemain baru, ya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:49]

Pemain baru.

391. KETUA: SALDI ISRA [48:50]

Kalau Ahmad Yuzar ... apa ... mantan sekda, kalau Misharti?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:54]

Mantan anggota DPD, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [48:56]

Mantan anggota DPD.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:57]

DPD.

395. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Oke. Silakan ... apa ... apa TSM-nya?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [49:00]

TSM-nya itu ada tiga cluster yang kami coba uraikan di dalam Pokok Permohonan kami.

Yang pertama, keberpihakan Pj Bupati Kampar.

Yang kedua, tidak didistribusikannya 71.806[*sic!*] lembar surat suara (...)

397. KETUA: SALDI ISRA [49:15]

Berapa? 71.800?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [49:18]

806 lembar undangan memilih kepada pemilih, Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Oke.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [48:21]

Dan adanya pembajakan suara yang dilakukan oleh oknum yang terhadap ini sudah kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kampar. Ada sekitar beberapa ratus di beberapa kecamatan dan TPS yang ada di Kabupaten Kampar, Yang Mulia.

401. KETUA: SALDI ISRA [49:39]

Oke.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAIS HASAN [49:40]

Terkait dengan pokok-pokok permohonan ini, kami ... dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [48:45]

Oke, silakan.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [48:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan waktunya. Pertama, kami melihat secara tersistematis itu, Yang Mulia, adanya keterlibatan Pj Bupati Kampar yang dalam hal ini nama beliau adalah Hambali.

405. KETUA: SALDI ISRA [50:27]

Ya

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [50:27]

Dimana Saudara Hambali ini, Yang Mulia, pada tanggal 30 April 2024 kemudian melantik Saudara Pihak Terkait sebagai Pj Sekda.

407. KETUA: SALDI ISRA [50:37]

Oke.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [50:38]

Padahal waktu itu, Yang Mulia, 4 bulan sebelum pendaftaran, Yang Mulia.

409. KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Oke.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [50:43]

Pendaftaran bulan Agustus. Kami menilai pelantikan tersebut bernuansa politik.

411. KETUA: SALDI ISRA [50:47]

Itu ketika itu jabatan sekjanya kosong atau tidak?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [50:50]

Sebelumnya jabatan sekda itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [50:57]

Oke. Nah, jadi ini pasangan calon pindah dari pasangan calon ke pasangan calon, gitu?

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:02]

Ya. Betul, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [51:04]

Terus?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:05]

Kemudian, Yang Mulia, setelah dilantik sebagai Pj Sekda, kemudian Pihak Terkait bersama dengan Pj Bupati Kampar kemudian melantik dan memperpanjang masa jabatan kepala desa, Yang Mulia, Pj kepala desa itu sebanyak 97 kepala desa yang berada di Kabupaten Kampar.

417. KETUA: SALDI ISRA [51:24]

Berapa?

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:25]

97, Yang Mulia.

419. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Kapan itu diperpanjang?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:27]

Di bulan September.

421. KETUA: SALDI ISRA [51:29]

Anda pernah baca surat Menteri Dalam Negeri, enggak? Bahwa yang habis masa jabatannya itu diperpanjang?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:33]

Belum, Yang Mulia.

423. KETUA: SALDI ISRA [51:35]

Oke. Nanti Anda baca, ya.

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:36]

Baik, Yang Mulia.

425. KETUA: SALDI ISRA [51:38]

Oke, lanjut.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:39]

Baik. Artinya itu 2 bulan sebelum pencobolosan diperpanjang, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [51:42]

Ya. Oke.

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [51:43]

Kemudian, Yang Mulia, kami juga menemukan bahwasanya pada tanggal 26 November 2024 atau tepatnya 1 hari sebelum pencobolosaan.

429. KETUA: SALDI ISRA [51:58]

Ya.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA

Pj kepala desa tersebut ... Pj ... mohon maaf, Pj Bupati kemudian mengundang seluruh kepala desa bersamaan dengan camat (...)

431. KETUA: SALDI ISRA [52:00]

Oke.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:02]

Se-Kabupaten Kampar, untuk melakukan rapat konsolidasi.

433. KETUA: SALDI ISRA [52:02]

Oke.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:05]

Kami menilai rapat tersebut bermuatan politik karena dilakukan satu hari menjelang pemilihan ini.

435. KETUA: SALDI ISRA [52:10]

Apa isi pertemuannya?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:10]

Kami tidak begitu mengetahui isi pertemuan. Namun, salah satu daripada peserta yang hadir tersebut menyatakan bahwasanya mereka dikonsolidasikan untuk Pemenangan Tim 03, Yang Mulia, atau Pihak Terkait.

437. KETUA: SALDI ISRA [52:20]

Oke, itu ada Anda buktikan?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:24]

Ada, Yang Mulia.

439. KETUA: SALDI ISRA [52:25]

Jadi, yang penting Anda tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi itu dinilai sebagai konsolidasi untuk memenangkan Nomor 3?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:34]

Baik, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [52:34]

Oke.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:35]

Hal tersebut dapat kami buktikan di P-7, Yang Mulia.

443. KETUA: SALDI ISRA [52:39]

Apa itu P-7 itu isinya?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:41]

Undangan rapat, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [52:42]

Kalau undangan rapat, ya lah orang rapat harus ada undangannya, kan?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:42]

Baik, ada undangan rapat dan juga beberapa chat WA, Yang Mulia.

447. KETUA: SALDI ISRA [52:49]

Oke, lanjut.

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:50]

Baik, kemudian secara ... secara terstruktur, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [52:53]

Secara terstruktur.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [52:54]

Ya, terstruktur. Mohon maaf, Yang Mulia.

Kemudian, kami juga menemukan adanya salah satu kepala dinas, yaitu yang bernama Zamhur dan kebetulan beliau itu adalah adik kandung dari Pihak Terkait.

451. KETUA: SALDI ISRA [52:59]

Oke.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [53:02]

Beliau ini adalah Pihak Kepala Dinas dari Dinas Pariwisata mengirimkan sejumlah uang, Yang Mulia, kepada saksi yang bernama Acep Firmansyah untuk membentuk tim dari masyarakat Sunda, Yang Mulia, untuk Pemenangan Tim 03 atau Pihak Terkait, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [53:24]

Kapan kejadiannya itu?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [53:26]

Pengiriman uang itu pada bulan Oktober, Yang Mulia, namun pada bulan November, tetap diberikan sejumlah uang untuk dibagikan kepada masyarakat Sunda, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [53:31]

Oke, itu berapa jumlah uangnya?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [53:39]

Pada bulan November itu sebanyak 6 juta, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [53:44]

Oke.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [53:45]

Kemudian kami juga menemukan ada fakta di lapangan, ketika Saudara Pihak Terkait ini memperoleh suara terbanyak setelah pengumuman dari KPU, dilakukanlah syukuran, Yang Mulia, dan dihadiri oleh salah satu camat, yaitu camat yang bernama Albukhari, Camat dari Kampar Kiri, Yang Mulia, Kampar Kiri Hilir. Nah, kami menilai camat tersebut tidak netral karena bagian daripada tim pemenangan, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [54:08]

Apa lagi?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [54:12]

Kemudian keterlibatan kepala desa, itu ada dua kepala desa yang dapat kami buktikan, yaitu Kepala Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Salo, dan Kepala Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Yang

Mulia. Dimana dalam postingan Facebook mereka dan juga dalam grup WhatsApp, secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait, Yang Mulia.

461. KETUA: SALDI ISRA [54:28]

Oke.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [54:33]

Kemudian, pelanggaran administrasi, kami juga menemukan ... ini juga pelanggaran pidana, Yang Mulia, pada TPS 01 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (...)

463. KETUA: SALDI ISRA [54:39]

Ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [54:44]

Di mana pada TPS 01 tersebut, KPPS membagikan 80 kertas suara kepada 4 saksi, Yang Mulia. Nah, kami dalam hal ini saksi juga melihat bahwasanya KPPS mencoblos sisa kertas suara tersebut dan setiap saksi mencoblos 10 kertas suara, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [55:03]

Ada buktinya?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:04]

Ada bukti dan juga sudah kami laporkan ke Bawaslu dan hari ini sudah ... Bawaslu Kabupaten Kampar dan sudah ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu Kabupaten Kampar, Yang Mulia.

467. KETUA: SALDI ISRA [55:11]

Oke.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:11]

Itu kami buktikan di P (...)

469. KETUA: SALDI ISRA [55:16]

Itu berapa TPS kejadian itu?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:18]

Yang di dalam video itu 1 TPS, Yang Mulia.

471. KETUA: SALDI ISRA [55:19]

1 TPS?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:19]

Ya.

473. KETUA: SALDI ISRA [55:19]

Oke.

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:21]

Kemudian (...)

475. KETUA: SALDI ISRA [55:21]

Lanjut.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA

Izin, Yang Mulia.

477. KETUA: SALDI ISRA [55:24]

Di TPS itu siapa yang menang?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:26]

Di TPS tersebut, Pihak Terkait, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [55:28]

Pihak Terkait, berapa suaranya?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:30]

Izin, saya tidak membaca itu, Yang Mulia. Di dalam Permohonan, kami tidak sebutkan.

481. KETUA: SALDI ISRA [55:34]

Ya kan perlu bagi kami, itu perlu angkanya lho.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:39]

Baik, Yang Mulia.

483. KETUA: SALDI ISRA [55:40]

Di TPS berapa itu?

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:41]

01 Desa Pangkalan Serik, Yang Mulia.

485. KETUA: SALDI ISRA [55:43]

Oke, TPS 01.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:43]

Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu.

487. KETUA: SALDI ISRA [55:50]

Pangkalan Serik?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:50]

Ya.

489. KETUA: SALDI ISRA [55:52]

Siak Hulu?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [55:52]

Ya, Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [55:55]

KPU. KPU ada Kabupaten Kampar?

492. TERMOHON: ANDI PUTRA

Ada, Yang Mulia.

493. KETUA: SALDI ISRA [56:00]

Itu di TPS-01 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu, berapa komposisi suara?

494. TERMOHON: ANDI PUTRA [56:08]

Untuk jumlah DPT-nya ada 345 di situ, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [56:12]

Oke, 345.

496. TERMOHON: ANDI PUTRA [56:15]

Ya, Yang Mulia.

497. KETUA: SALDI ISRA [56:16]

Komposisi suaranya ingat, enggak?

498. TERMOHON: ANDI PUTRA [56:18]

Saya enggak ingat, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [56:19]

Oke, nanti tolong diterangkan ini, ya.

500. TERMOHON: ANDI PUTRA [56:21]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

501. KETUA: SALDI ISRA [56:22]

Oke, lanjut.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [56:25]

Baik, terima Kasih, Yang Mulia.

Kemudian, secara masif kami juga melihat, Yang Mulia. Mohon maaf, ini yang masih terstruktur. Kami juga menemukan di TPS-01 Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Yang Mulia.

503. KETUA: SALDI ISRA [56:43]

Ya.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [56:44]

Ada 16 lembar C.Pemberitahuan undangan yang kami temukan pada tim Pihak Terkait, Yang Mulia, dan hal tersebut tidak dibagikan beliau.

505. KETUA: SALDI ISRA [56:53]

Oke.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [56:53]

Jadi ada 16 kami temukan di rumah ... di rumah makan dan kebetulan rumah makan itu rumah makan beliau. Nah, pertanyaan kami,

kenapa Pihak Terkait, timnya yang memegang C-6 ini C.Pemberitahuan ini, Yang Mulia.

Kemudian, secara masif kami juga melihat bahwasannya terdapat 71.000.

507. KETUA: SALDI ISRA [57:12]

Tadi sudah tadi, 71.000 enggak usah diulangi lagi.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:14]

Baik. Perlu kita rincikan, Yang Mulia, Kecamatanannya.

509. KETUA: SALDI ISRA [57:15]

Oke.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:15]

Ya.

511. KETUA: SALDI ISRA [57:16]

Ndak. Kecamatanannya ada, ya?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:21]

Ada, Yang Mulia.

513. KETUA: SALDI ISRA [57:24]

Nanti Anda jawab, ya. KPU.

514. TERMOHON 29: ANDI PUTRA [57:24]

Siap, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [57:26]

Itu, 71.806 undangan tidak dibagikan. Ya, itu ya?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:31]

Baik, Yang Mulia.

517. KETUA: SALDI ISRA [56:32]

Enggak usah ... kecamatannya enggak usah diuraikan, sudah ada dalam Permohonan.

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

519. KETUA: SALDI ISRA [57:38]

Apalagi yang mau disampaikan?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:37]

Selanjutnya, Yang Mulia. Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, terdapat 700 DPK satu Desa itu, Yang Mulia. 700 DPK, kami menilai ini adalah celah untuk pemilihan DPT ganda, Yang Mulia. Karena dapat kami buktikan pada P-36 dan P-36B, dimana, Yang Mulia, pada TPS ... pada Desa Danau Lancang tersebut, ada 416 orang, Yang Mulia yang DPT ... pemilih tersebut bukan berada di DPT Desa Danau Lancang tersebut (...)

521. KETUA: SALDI ISRA [57:42]

Ya.

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:44]

Bahkan kami lakukan cokolit atau cek DPT online, itu ternyata berada di DPT di luar Provinsi Riau. Ada di Bangka Belitung, di Jakarta, bahkan ada di Medan, Yang Mulia.

Nah, kami juga melihat, ternyata dari 416 orang tadi, tersebar di hampir 29 TPS, Yang Mulia.

523. KETUA: SALDI ISRA [58:27]

Oke, Lanjut.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [58:27]

Kemudian, pada TPS 11, masih dalam desa yang sama, Yang Mulia, kami menemukan ada 21 orang dalam TPS 11 yang terdaftar di TPS 11, itu juga memilih di 9 TPS lainnya, Yang Mulia. Hal tersebut dapat kami buktikan dari daftar absensi tulisan tangan, Yang Mulia.

525. KETUA: SALDI ISRA [58:48]

Oke, lanjut.

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [58:52]

Ok. Kemudian di Kecamatan Tapung, kami juga menemukan di TPS 01, ada 16 orang, Yang Mulia, yang saat pada tanggal 27 November tidak berada di Desa Sungai Agung tersebut, Yang Mulia. Bahkan ada yang kuliah di Mesir dan juga berada di Malaysia, tapi di absensi memilih, Yang Mulia.

527. KETUA: SALDI ISRA [59:12]

Oke, jangan-jangan dia pulang ketika pemilihan itu?

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:13]

Kami sudah konfirmasi ke beliau, juga sudah kami jadikan sebagai saksi untuk pemeriksaan di Bawaslu, Yang Mulia.

529. KETUA: SALDI ISRA [59:16]

Oke.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [57:17]

Dari keterangan beliau, mereka tidak ikut memilih.

531. KETUA: SALDI ISRA [59:22]

Oke. Ini kan semua itu ada di sini, ya?

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:24]

Baik, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [59:25]

Apa yang lain, di luar yang itu? Di luar soal DPT ini dan segala macamnya, ada yang lain, enggak?

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:32]

Money politics, Yang Mulia.

535. KETUA: SALDI ISRA [59:33]

Apa money politics-nya?

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:33]

Kami menemukan ada beberapa tempat di Kecamatan Siak Hulu, kami terutama di Desa Pangkalan Baru, Desa Buluh nipis, itu beberapa ... apa namanya ... pemilih ini menerima uang, Yang Mulia. Sejum (...)

537. KETUA: SALDI ISRA [59:44]

Dari?

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:45]

Dari Tim Pihak Terkait.

539. KETUA: SALDI ISRA [59:49]

Oke.

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:50]

Dan hal ini sudah kami laporkan juga ke Bawaslu, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [59:51]

Tim Pihak Terkait, siapa timnya?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [59:55]

Atas nama Metro, Yang Mulia. Ini dilakukan oleh istri Metro. Metro ini adalah Korcam dari Pihak Terkait.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:00:00]

Jangan-jangan itu suaminya Metro TV, ya.

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:03]

Tidak, Yang Mulia. Mungkin, Yang Mulia.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]

Oke, lanjut.

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:07]

Ya.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Atau Metro Mini begitu.

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:09]

Baik, Yang Mulia. Nah, itu kami temukan, dan sudah kami juga laporkan ke Bawaslu dan ada bukti video dan foto, Yang Mulia.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:00:15]

Oke.

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:16]

Itu Bukti P-20 dan P-21. Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:00:20]

Lanjut ke Petitum kalau begitu.

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:22]

Baik.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]

Ini di ... apa ... di Kampar berapa Kecamatan?

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:28]

21, Yang Mulia.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:00:30]

Yang Anda minta di Petitum ini berapa Kecamatan?

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:32]

4 Kecamatan, Yang Mulia.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:00:33]

4 Kecamatan?

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:35]

Ya.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Ini banyak sekali ini.

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:40]

Baik.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:00:41]

Coba Anda bacakan.

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:42]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:01:36]

Berapa kecamatan itu?

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:01:38]

Kalau permohonan awal ini 21, Yang Mulia. Namun, poin nomor 2-nya.

Atau setidaknya-tidaknya (...)

565. KETUA: SALDI ISRA [01:01:44]

Oh ini di seluruh kecamatan, di sini?

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:00:45]

Ya, Permohonan ... Petitum awalnya di seluruh kecamatan (...)

567. KETUA: SALDI ISRA [01:01:48]

Bukan Petitum awal, Petitum pertamanya (...)

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:01:50]

Eh Petitum pertama (...)

569. KETUA: SALDI ISRA [01:01:51]

Petitum semua kecamatan?

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:01:52]

Ya. Betul, Yang Mulia.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:01:53]

Kecamatan, 21, ya?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:01:54]

Ya, Yang Mulia.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:01:55]

Oke. Lanjut.

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:01:57]

Lanjut.

3. Memerintah Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bangkinang. Mohon maaf, saya bacakan seluruhnya, Yang Mulia.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:02:06]

Enggak usah.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:02:07]

Dianggap dibacakan.

Atau setidaknya.

4. Memerintah Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendala ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:02:38]

Saya tanya satu ini.

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:02:39]

Baik, Yang Mulia.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:02:40]

Pertanyaan ringan. Kalau di Kampar itu 21 kecamatan dan semuanya diminta, kenapa tidak disebutkan saja di Kabupaten Kampar, begitu?

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:02:47]

Baik, Yang Mulia.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:02:48]

Apa logikanya itu? Anda terangkan.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:02:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini yang dapat kami buktikan secara masif itu terjadi di 4 kecamatan, Yang Mulia.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:02:57]

Bukan, itu lain soal. Yang di atas itu kan semua kecamatan itu. Kenapa ndak Anda tulis, melakukan pemungutan suara semua TPS di Kabupaten Kampar?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:03:02]

Ingin mempertegas kecamatannya, Yang Mulia.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:03:09]

Eh sudah salah, jangan ... jangan dibela juga itu.

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:03:12]

Baik, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:03:16]

Oke. Lalu kemudian ada alternatifnya, setidaknya-tidaknya di 4 kecamatan, ya?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:03:22]

Baik, Yang Mulia.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:03:23]

Siak Hulu, Tapung Hulu, Tapung Hilir, dan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:03:30]

Baik, Yang Mulia.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:03:31]

Oke. Ada lagi, cukup?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:03:32]

Cukup.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:03:36]

Pak Ridwan, ada yang mau disampaikan?

594. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:03:38]

Terima kasih, Yang Mulia, sedikit.
Saudara Pemohon, ya.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:03:41]

Baik, Yang Mulia.

596. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:03:46]

Ini kan Saudara mendalilkan TSM ini, banyak sekali, ya. Nah, sementara Saudara di Petitemnya itu tidak minta diskualifikasi. Ya, coba lihat di Petitemnya itu. Kalau kemudian di PSU, kemudian terjadi lagi TSM bagaimana? Nah, nanti itu ya. Nanti dibuktikan oleh Saudara.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:04]

Baik.

598. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:06]

Kalau sampai pada tingkat pembuktian.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:06]

Baik.

600. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:04:08]

Terima kasih.
Yang Mulia Pak Arsul?

602. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:10]

Ya, satu saja.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:13]

Siap, Yang Mulia.

604. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:15]

Anda dalilnya TSM, tapi Anda baik sekali gitu, tidak minta diskualifikasi. Itu semua Pemohon yang dalilnya TSM itu pasti ada Petitum diskualifikasi. Tapi ya, itu hak Anda ya, harus dihormati.

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:27]

Baik, Yang Mulia.

606. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:28]

Saya ingin tanya 1 saja. Kan tadi diuraikan pelanggaran-pelanggaran, ya?

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:35]

Baik, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:35]

Ada enggak, yang kemudian dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas Pilkada?

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:42]

Baik.

610. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:42]

Atau bahkan ke Gakkumdu? Ada enggak di antara sekian pelanggaran itu?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:46]

Ada 14 laporan, Yang Mulia.

612. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:46]

Ada 14 laporan?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:49]

Ya.

614. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:50]

Dan apa respons Bawaslu?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:52]

Ada sebagian telah diproses, Yang Mulia.

616. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:55]

Oke.

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: RICO FEBPUTRA [01:04:55]

Dan sudah lanjut ke Gakkumdu.

618. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:58]

Oke. Ya, ini nanti tolong Bawaslu Kampar ada, kan? Ada? Baik. Nanti kami mohon juga dijelaskan, ya. Soal pengaduan-pengaduan ini. Saya kira itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:05:10]

Terima kasih.
KPU, ya. Ini yang 71.806 itu nanti Anda jelaskan, ya.

620. TERMOHON: ANDI PUTRA [01:05:15]

Baik, Yang Mulia.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:05:16]

Ya, ini banyak lho, kalau begini orang tidak Anda panggil walaupun secara hukum orang yang tidak terima undangan itu masih bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau memang Anda tidak panggil dengan sejumlah ini dan ada unsur yang disengaja, nah, itu berbahaya. Makanya harus Anda jelaskan, ya.

Bawaslu, tolong konsen ini juga, ya? Dijelaskan yang ini, dalil mereka tadi itu. Banyak lho, 71.000 itu. Itu kalau dibawa bisa 1 truk itu.

Ya, warga yang dari luar Kampar itu yang DPT-nya setelah dicek katanya, cokit katanya, kan. Nah, rupanya ini ada orang memilihnya di Jakarta.

622. TERMOHON: ANDI PUTRA [01:05:57]

Baik.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:05:58]

Tolong dibuktikan. Karena ini baru klaim sepihak ini. Nanti akan ada fakta di sini, fakta di sini, fakta di sini. Yang agak anehnya itu kalau nanti ada orang mengutip ini yang dari mulut Anda saja dikutip, lalu sampai di sini enggak dikutip, seolah-olah Anda yang benar nanti, oke? Nah, makanya ini semua Pihak dihadirkan untuk membuat terang peristiwa itu.

624. TERMOHON: ANDI PUTRA [01:06:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:06:25]

Ya, terima kasih kembali.

Kalau begitu yang 3 grup ini silakan pindah ke belakang, pindah 3 grup yang lain. Kalau yang ininya enggak perlu pindah, Pak, tetap saja. Belum giliran juga kok. Bukan. Kalau ini tetap, nanti kalau giliran di sini baru kita pindah-pindahkan juga. Ini enggak diperintah bergerak, kok. Padahal yang diperintahkan di sini.

Selanjutnya Perkara 158, Kabupaten Biak Numfor. Silakan, Kuasa Hukumnya.

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:07:57]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Konstitusi yang kami muliakan.
Untuk yang (...)

627. KETUA: SALDI ISRA [01:07:59]

Ini kantor hukumnya Putra Siliwangi, ya?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:08:00]

Baik, Yang Mulia.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:08:01]

Ini kok yang hadir Putri? Maksudnya Putri Siliwangi dong? Nama Kantor Hukumnya Putra Siliwangi, tapi yang hadir lawyernya di sini putri, mestinya ganti saja ini Putri Siliwangi, begitu. Silakan lanjut.

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:08:16]

Untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dengan Nomor Perkara Nomor 158 atas Keputusan KPU Nomor 164 Tahun 2024 yang diajukan oleh Saint Benhur Mansnandifu, S.E., selaku Calon Bupati Biak Numfor dan Yohan Anthon Kho selaku Wakil Bupati Biak Numfor sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Terkait Kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Biak Numfor.

Tenggang Waktu Permohonan, menurut Pemohon, masih dalam batas waktu.

Terkait Surat Keputusan Nomor 164 yang dikeluarkan oleh KPU tertanggal 5 Desember 2024, kemudian muncul Surat Keputusan Nomor 165 yang dikeluarkan KPU tertanggal 8 Desember 2024, yang mana pada poin ke 1, di judul Surat Keputusan Nomor 164 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Namun, di Surat Keputusan Nomor 165 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, kata *terpilih* dihilangkan di Surat Keputusan Nomor 165.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:09:36]

Itu Anda jadikan bukti enggak dua-duanya?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:09:37]

Dijadikan, Yang Mulia.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:09:38]

Oke, tolong buktinya. Nomor bukti P berapa itu?
Enggak, ini kita ada. Sudah diserahkan belum?

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:09:44]

Yang 165-nya belum, Ya Mulia. Karena kita menerimanya setelah revisi.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:09:44]

Oke.

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:09:52]

Tapi ada (...)

637. KETUA: SALDI ISRA [01:09:53]

Ada yang bisa diantarkan ke saya, satu? Tolong diambil, Petugas. Lanjutkan.

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:10]

Ini menjadi hal yang membuat keliru bagi paslon nomor urut lainnya, Ya Mulia.

Pada poin kedua, pada Surat Keputusan Nomor 164 hanya disebutkan Paslon Nomor Urut 1 dengan hasil perolehan suara 26.931 atau 41,7%. Di Surat Keputusan Nomor 165 disebutkan ketiga pasangan paslon.

Yang menjadi perhatian, pada Paslon Nomor Urut 1 dengan hasil perolehan suara, sama ... sama dengan Surat Keputusan Nomor 164 dengan hasil 26.931, namun presentasi menjadi 42%. Bagaimana dengan selisih 0,3-nya, Ya Mulia? Apa dasarnya hasil perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon di Surat Keputusan Nomor 164?

Pada poin ketiga, pada Surat Keputusan Nomor 165 dijelaskan bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, yang mana pada tanggal 5 Desember 2024 sudah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 164.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:10:33]

Oke, Anda ini mendaftar pakai yang 164 atau 165?

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:37]

Pertama di 164, Ya Mulia.

641. KETUA: SALDI ISRA

164, tanggalnya sama kan?

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:43]

Tanggal 5.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:10:44]

Oke.

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:46]

Berita Acaranya di tanggal 5 (...)

645. KETUA: SALDI ISRA [01:10:47]

Oke (...)

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:46]

Tapi yang di SK 165 (...)

647. KETUA: SALDI ISRA [01:10:51]

Dia terlepas dari SK yang beda (...)

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:46]

Ya (...)

649. KETUA: SALDI ISRA [01:10:53]

Yang Anda jadikan starting untuk mendaftarnya yang tanggal 5, kan?

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:10:57]

Ya (...)

651. KETUA: SALDI ISRA [01:10:58]

Karena, baik 164 maupun 65, tanggalnya sama, ya?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:12:02]

Yang satu tanggal 5 itu, dikeluarkannya di tanggal 9.

653. KETUA: SALDI ISRA [01:12:08]

Ya, bukan. Ini pertanyaan saya, kan ditetapkan tanggal 5, duaduanya ini, yang Anda jadikan untuk menentukan batas waktu mendaftar itu tanggal 5 atau tanggal 9?

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:12:22]

Tanggal 5.

655. KETUA: SALDI ISRA [01:12:23]

Tanggal 5.

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:12:25]

Ya.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:12:27]

Oke. Nah, itu kan satu hal yang untuk menjelaskan bahwa tidak ada keterlambatan Permohonan ini?

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:12:28]

Ya

659. KETUA: SALDI ISRA [01:12:27]

Karena menggunakan tanggal 5. Yang kedua baru soal subsansinya, ya? Oke, silakan lanjutkan. Jangan Anda buat panjang-panjang di situ, pada itu kan bagian kecil saja dari seluruh persoalan.

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:12:45]

Ya. Kemudian Pokok Permohonan.

Yang pertama mengenai pelanggaran bahwa tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap KPPS yang menjadi tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

661. KETUA: SALDI ISRA [01:13:02]

Jadi, ini penyelenggaran tidak disumpah?

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:13:04]

Ya, Yang Mulia.

663. KETUA: SALDI ISRA [01:13:06]

Dulu, Anda persoalkan enggak sebelum hasil diketahui?

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:13:09]

Sudah pernah dilaporkan ke Pihak Bawaslu.

665. KETUA: SALDI ISRA [01:13:12]

Kapan itu dilaporkan?

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:13:14]

Tanggal 2 Desember 2024.

667. KETUA: SALDI ISRA [01:13:15]

2 Desember itu sudah diketahui hasil itu. Ketika proses menuju pemungutan suara, ada ndak di antara pasangan calon yang mempersoalkan itu tidak disumpah?

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:13:26]

Ada, Yang Mulia. Kami melaporkan ke Bawaslu beberapa kali dan kemudian pada...

669. KETUA: SALDI ISRA [01:13:31]

Soal tidak disumpah ini?

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:13:32]

Tidak disumpah.

671. KETUA: SALDI ISRA [01:13:33]

Yang pertanyaan saya aja yang dijawab. Berkait dengan penyelenggara yang tidak disumpah itu pernah dilaporkan atau tidak sebelum pemungutan suara?

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:13:39]

Belum, Yang Mulia.

673. KETUA: SALDI ISRA [01:13:43]

Oke, itu kan clear.

Jadi ini kan sesuatu yang kemudian muncul setelah hasil diketahui.

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:13:43]

Ya.

675. KETUA: SALDI ISRA [01:13:44]

Oke, lanjut.

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRINA AULYA RABBANI [01:13:52]

Kemudian, pada tanggal 4 Desember 2024, surat diregister dengan alasan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil dan akan ... dan akan ... maaf, Yang Mulia ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku.

Pada hari ini, kami akan melampirkan bukti baru, Yang Mulia, dengan Nomor 004 dengan status laporan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Biak Numfor dengan alasan laporan diduga terbukti sebagai pelanggaran administrasi pada pemilihan tahun 2024.

677. KETUA: SALDI ISRA [01:14:28]

Oke, sekarang ini pertanyaan saya begini. Ini kan lewat ... apa ya ... lewat, melewati Pasal 158 ya, tidak memenuhi itu. Apa unsur-unsur TSM-nya sehingga kami itu harus mengenyampingkan Pasal 158, itu yang harus dijelaskan dulu. Nah, itu yang harus dijelaskan. Ya, silakan.

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:14:53]

Baik, Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia, saya izin melanjutkan. Untuk TSM-nya ini, secara sistem pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 itu bekerjasama ... diduga bekerjasama dengan Termohon.

Izin, terjadi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 berupa adanya penambahan suara sebanyak 103 di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, pada tanggal 27 November 2024, pada sekitar pukul 07.00 WIT, bertepatan pada hari pencoblosan. Bukti dilampirkan adalah bukti video pada (vide Bukti P-48).

679. KETUA: SALDI ISRA [01:14:33]

Penambahan suara berapa jumlahnya?

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:14:35]

103 di TPS 01, Kelurahan Snerbo.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:14:39]

Oke, terus apa lagi?

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:13:04]

Kemudian, pada tanggal 26 November juga sama, Yang Mulia. Kemudian pada tanggal 26 November, Pihak Termohon Biak Numfor ini telah melakukan pemusnahan terhadap surat suara yang rusak maupun sisa surat suara agar tidak disalahgunakan, terdapat pada Bukti P-21, P-21A sampai dengan P-21C. Artinya, sudah tidak ada lagi surat suara sisa yang tersimpan di kantor, maupun gudang Pihak Termohon. Telah kita ketahui juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 80 ayat (1) mengenai jumlah surat suara yang dicetak, sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap, sebagai cadangan, sehingga seharusnya surat suara tidak ada lagi penambahan. Kemudian, hal tersebut terjadi di KPS ... TPS 01 yang di Yendidori yang dimana kekurangan 10 surat suara dan kemudian Termohon datang untuk menyerahkan.

Izin, Yang Mulia, apabila Pihak Termohon merasa keberatan dengan apa yang kami dalilkan, kami mohon Pihak Termohon untuk melakukan klarifikasi terkait hal ini.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:16:43]

Itu enggak perlu Anda minta (...)

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:16:44]

Baik.

685. KETUA: SALDI ISRA [01:16:45]

Itu biar saja, itu sudah pekerjaan mereka.

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:16:45]

Siap, Yang Mulia.

687. KETUA: SALDI ISRA [01:16:46]

Ya.

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:16:46]

Baik.

689. KETUA: SALDI ISRA [01:16:47]

Pokoknya sampaikan saja apa yang menjadi masalah, temuan Saudara sampaikan saja, mau mereka jawab atau tidak, itu urusan mereka itu.

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:16:55]

Ya, baik.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:16:56]

Lanjut.

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:16:57]

Baik. Poin ketiga, mengenai pelanggaran tidak diserahkannya C.Hasil pada saksi mandat pada Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Kami Pihak Pemohon tidak menerima C.Hasil di 17 tempat pemungutan suara TPS.

Adapun nama TPS yang diserahkan, Salinan C.Hasil dianggap kami bacakan. Dan kami pada hari ini, Yang Mulia, telah melampirkan bukti video percakapan antara tim kemenangan salah satu paslon dengan KPU Kabupaten Biak Numfor yang menerangkan bahwa C.Hasil tidak wajib untuk diserahkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, saksi mandat dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapatkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Bupati.

Dan pelanggaran Nomor 4, Yang Mulia, pelanggaran mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Termohon untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024. Hal ini dibuktikan bahwa pengi ... pengiriman kapal logistik pilkada menggunakan kapal milik tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan bukti video (vide P-69B) dalam bentuk flashdisk, yaitu pengakuan dari pemilik kapal atas nama Ruslan dan (vide P-69C), yaitu ucapan terima kasih (...)

693. KETUA: SALDI ISRA [01:18:11]

Jadi ini ... apa namanya, kertas suara ya yang dikirim?

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:18:12]

Betul, Yang Mulia, betul.

695. KETUA: SALDI ISRA [01:18:15]

Lalu kalau dikirim pakai kapal itu, apa masalahnya?

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:18:20]

Bahwa kalau berdasarkan Pasal 35 ayat (5) PKPU Nomor 12 Tahun 2024, pengiriman logistik seharusnya meli ... tidak melibatkan pihak ketiga, tapi melibatkan pihak kepolisian (...)

697. KETUA: SALDI ISRA [01:18:33]

Ada enggak orang mencoblosi, dikirim pakai kapalnya, lalu diatas kapal dicoblos, enggak ... enggak?

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:18:40]

Diduga, Yang Mulia.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:18:41]

Jangan Anda duga-duga saja.

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:18:41]

Dan jaraknya, jadi pengiriman logistik itu dikirim dari Kabupaten Biak ke Numfor.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:18:49]

Ya (...)

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:18:50]

Dan (...)

703. KETUA: SALDI ISRA [01:18:51]

Yang jadi masalah itu, itu kan bisnis, ya kalau orang mau menyewa dan ada kebutuhannya itu, bagaimana lagi sepanjang tidak diotak-atik kotak suaranya atau suaranya diatas kapal itu. Kecuali Anda bisa buktikan, sepanjang perjalanan itu dicoblos semua, begitu. Ada enggak?

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:19:08]

Tidak, Yang Mulia.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:19:08]

Oke, lanjut.

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:19:11]

Baik, kami langsung ke Petitem kami, Yang Mulia.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:19:12]

Oke, langsung.

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:19:13]

Petitem kami yang pertama, eh... yang nomor kelim ... poin kelima.

Bahwa tidak sahnya penetapan calon bupati dan wakil bupati (...)

709. KETUA: SALDI ISRA [01:19:21]

Ini langsung Petitem?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:19:23]

Yang kelima, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:19:25]

Oke, yang kelima apa?

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:19:26]

Bahwa tidak sahnya penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor 2024 dianggap dibacakan.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:19:33]

Oke.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:19:34]

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan.
 - a. Komisi ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 04.56 WIT.
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Atau,

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:21:03]

Oke. Pertanyaan kami ini, itu Petitum alternatif angka 3, ya. Ya, betul?

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:21:12]

Betul, Yang Mulia.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:21:13]

Itu alternatif terhadap nomor berapa di atas?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:21:20]

Nomor Urut 1, Yang Mulia, dan 2 (...)

719. KETUA: SALDI ISRA [01:21:25]

Nomor Urut 1, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya itu?

Jadi, ini supaya yang bikin permohonan paham juga, bikin alternatif itu alternatifnya terhadap apa? Jangan asal bikin *atau setidaknya* *tidaknya* *atau* begitu, harus jelas juga. Ini nomor 3 dialternatifkan terhadap apa?

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:21:53]

Keputusan diktum 1 dan diktum 2, Yang Mulia.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:21:55]

Diktum 1 dan diktum 2? Oke.

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:21:56]

Poin a. 2 ... A2... 2a, dan b.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:22:00]

Oke, jadi angka 3 ini alternatif terhadap 2a dan 2b, gitu? Atau 2b saja atau 2a saja?

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:22:10]

2a dan 2b.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:22:12]

Oke, ya. Ini dicatat, ya, supaya kami juga jelas bersikap terkait dengan hal seperti ini. Oke, terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul.

726. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Ini Saudara Pemohon, ya, Anda antara lain kan minta agar Paslon Nomor 2 ini didiskualifikasi. Alasannya karena terkait dengan kasus asusila. Apa ini kasus asusilanya?

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:22:49]

Untuk Paslon Nomor Urut 2 ini telah dilaporkan asusi ... jadi Paslon Nomor 2 ini sebelumnya bupati incumbent, Yang Mulia.

728. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:56]

Ya.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:22:57]

Dan pada saat proses ... setelah proses pemilihan, Paslon Nomor 2 (...)

730. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:04]

Setelah ditetapkan atau sebelum dilaporkannya?

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:23:09]

Setelah ditetapkan.

732. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:10]

Oke, terus? Dilaporkan?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:23:13]

Dilaporkan atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur sesama jenis.

734. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:19]

Oke.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:23:20]

Dan sudah masuk laporan polisi dan sudah jadi tersangka.

736. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:24]

Bisa dibuktikan, ya?

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [01:23:27]

Baik, Yang Mulia. Sudah ada di bukti surat, Yang Mulia.

738. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:30]

Ada, ya? Ya. Ini juga di Permohonan juga, ini para lawyer ini harus correct, ya. Ini mengutip Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 ... 10[*sic!*] Tahun 2016. Ini baca enggak, waktu mengutip ini ... apa Pasal 7 ayat (1) ini? Pasal 7 ayat (1) itu terkait dengan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama, bukan tentang syarat-syarat, syarat-syarat saja di ayat (2). Nah, di poin berapa itu yang mengatakan kalau terjerat kasus hukum tidak boleh menjadi calon? Bisa dijelaskan? Ini untuk para Lawyer ini.

Di MK ini para Hakimnya membaca semua berkas, ya. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau yang mempresentasikan bukan yang membuat. Itu catatan buat para lawyer. Saya ini sayang sama profesi lawyer karena saya dulu advokat, begitu ya, dan harus ... advokat itu harus correct gitu, di samping honest (jujur).

Saya kira itu saja catatan, ya. Jadi tidak kemudian asal kutip ... berharap tidak dibaca, dibaca ini semua Permohonan. Meskipun Permohonan Anda tebal ini, 60 halaman, saya baca, saya ketemuan di halaman 50, ya.

Oke, terima kasih.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:25:11]

Terima kasih. Yang Mulia Pak Ridwan.

740. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:25:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara ... Saudari Pemohon, ya. Ini kan di Petitemnya ini membatalkan Keputusan KPU, yang pertama itu. Kemudian juga yang b-

nya itu mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berarti ini calon tunggal, ya? Nah, itu dijelaskan nanti seperti itu.

Ya, terima kasih.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:26:00]

Cukup? Terima kasih. Cukup, ya. Miknya dimatikan.
Oke sekarang Nomor 80 Kabupaten Buton Selatan.

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:26:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:26:05]

Silakan.

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:26:05]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi salam, sejahtera bagi kita semua.

Baik. Kami akan membacakan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan 2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.32 WITA.

Yang Muli... Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Majelis Konstitusi ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenankan, kami Kuasa Hukum dari Aliadi, S.Pd. dan La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si., yaitu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pason Nomor Urut 3.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi (...)

745. KETUA: SALDI ISRA [01:27:06]

Mahkamah berwenang, oke.

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:27:06]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara ini.

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
Bahwa kami mengajukan permohonan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Kedudukan Hukum Pemohon.
Bahwa Pemohon merupakan Paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buton Selatan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3/2024.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:27:30]

Oke.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:27:36]

Pokok Permohonan.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:27:43]

Ini kan ... apa ... melebihi kuota, ya? Melebihi yang melewati Pasal 158, kan?

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:27:49]

Betul, Yang Mulia.

751. KETUA: SALDI ISRA [01:27:49]

Nah, apa yang menyebabkan Mahkamah harus mengenyampingkan Ketentuan 158 itu?

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:27:55]

Bahwa menurut Pemohon, adanya perselisihan perolehan suara Pemohon itu adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur sistematis dan masif.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:28:05]

Ya.

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:28:06]

Yaitu, terdapat penambahan pemilihan yang kami sampaikan di dalam Bukti P-4 sampai P-20, Yang Mulia. Dan kami telah melaporkan kepada Bawaslu dan sampai saat ini belum ada tanggapan.

Dan kami juga (...)

755. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Ya, kenapa?

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:28:27]

Dalam poin keempat. Bahwa ada indikasi kecurangan yang nampak secara vulgar oleh pejabat pemerintah daerah dalam hal Pj. Bupati Buton Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 429 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 18 November 2024.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:28:55]

Siapa yang memberhentikan ini? Yang melakukan siapa?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:28:00]

Pj. Bupati Buton Selatan, Yang Mulia.

759. KETUA: SALDI ISRA [01:29:00]

Oke, Pj. Bupati yang melakukan pemberhentian?

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:03]

Siap, Yang Mulia.

761. KETUA: SALDI ISRA [01:29:06]

Tapi kan PJ Bupati tidak calon kan?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:10]

Yang melakukan pemberhentian, Yang Mulia. Itu dalam Bukti P-21, Yang Mulia.

763. KETUA: SALDI ISRA [01:29:12]

Ya, Kan Pj. Bupati yang memberhentikan.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:17]

Ya.

765. KETUA: SALDI ISRA [01:29:17]

Ya, lalu apa hubungannya dengan calon?

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:19]

Dia mengeluarkan Surat Keputusan, Yang Mulia.

767. KETUA: SALDI ISRA [01:29:23]

Oh, Pj Bupati ini?

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:23]

Ya.

769. KETUA: SALDI ISRA [01:29:25]

Kan bukan calon yang mengeluarkan surat keputusan?

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:26]

Bukan.

771. KETUA: SALDI ISRA [01:29:26]

Oke.

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:29]

Tapi dia mengeluarkan ... dia mengeluarkan surat (...)

773. KETUA: SALDI ISRA [01:29:29]

Oke, lanjut.

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:29:33]

Bahwa selang sehari Pj. Bupati Buton Selatan, kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 430 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 429 Tahun 2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, yaitu tertanggal 19 November 2024.

775. KETUA: SALDI ISRA [01:30:01]

Oke, apa lagi?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:02]

Bahwa pelanggaran dilakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu terkait mutasi 66 pejabat.

777. KETUA: SALDI ISRA [01:30:12]

Oke.

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:12]

Sudah dilaporkan, Yang Mulia.

779. KETUA: SALDI ISRA [01:30:15]

Apa lagi?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:19]

Dalam Bukti P-24 kami bahwa terindikasi adanya mobilisasi massa ASN yang dilakukan oleh Pj. Bupati ... Pj Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat pasangan calon bupati atau wakil bupati dengan mengeluarkan SK Nomor 429 yang jelas membuktikan akan keterlibatan pejabat tinggi pada Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan dengan agenda-agenda terselubung yang sangat merugikan Pemohon dikarenakan terdapat temuan berbagai foto-foto PJ Bupati Selatan, bersama tim pemenangan paslon nomor urut ... Paslon Nomor Urut 2, yaitu Muhammad Adios dan La Ode Risawal.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:30:56]

Ini yang meraih suara terbanyak bupati ya, incumbent?

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:58]

Bukan, Yang Mulia.

783. KETUA: SALDI ISRA [01:31:00]

Oke.

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:00]

Baru semua.

785. KETUA: SALDI ISRA [01:23:00]

Baru semua. Tapi Pj-nya yang terindikasi.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:05]

Ya.

787. KETUA: SALDI ISRA [01:30:09]

Membantu salah satu pasangan calon.

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:09]

Paslon 2, Yang Mulia.

789. KETUA: SALDI ISRA [01:30:11]

Paslon 2. Lalu Pj-nya mengeluarkan SK, memberhentikan orang, dan segala macam, begitu?

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:13]

Betul, Betul, Yang Mulia.

791. KETUA: SALDI ISRA [01:30:14]

Oke, lanjut.

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:15]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa terjadi serangan fajar H-1, pemilihan untuk memobilisasi massa dengan sebaran amplop yang berisi uang Rp500.000,00 untuk orang yang memenangkan Paslon Nomor Urut 2, yaitu Muhammad Adios dan La Ode Risawal. Bukti P-25, Yang Mulia.

793. KETUA: SALDI ISRA [01:30:36]

Berapa orang ini yang dapat serangan fajar ini?

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:39]

Hampir seluruh TPS, Yang Mulia.

795. KETUA: SALDI ISRA [01:30:43]

Hampir seluruh TPS menerima Rp500.000,00?

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:47]

Ya.

797. KETUA: SALDI ISRA [01:30:47]

Bisa Dibuktikan?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:48]

Bisa, Yang Mulia.

799. KETUA: SALDI ISRA [01:30:49]

Bukti berapa itu?

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:30:50]

P-25, Yang Mulia.

801. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]

P-25 itu kan cuma Muhammad Adios dan La Ode Risawal. Bagaimana bukti itu bisa merepresentasikan hampir semua TPS itu? ...

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:00]

Ada rekaman video, Yang Mulia.

803. KETUA: SALDI ISRA [01:32:02]

Rekaman video itu menunjukkan semua TPS menerima uang itu?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:05]

Saksi.

805. KETUA: SALDI ISRA [01:32:07]

Saksi menerima uang itu?

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:09]

Ya.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:32:11]

Ini yang pas-paslah, saksi atau pemilih?

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:14]

Enggak, jadi (...)

809. KETUA: SALDI ISRA [01:32:15]

Gimana?

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:16]

Jadi yang menerima itu sebagai saksi dalam (...)

811. KETUA: SALDI ISRA [01:32:19]

Oh, saksi yang menerima. Jangan-jangan honorinya sebagai saksi itu?

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:25]

Enggak, maksudnya si penerima itu, dia yang sebagai saksi dalam perkara ini, gitu.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:32:31]

Oke, berapa orang? 2 orang?

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:35]

Ya.

815. KETUA: SALDI ISRA [01:32:36]

Oke, lanjut. Lanjut, Petitem.

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKA RAHMAWATI [01:32:41]

Baik, Yang Mulia.

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:32:44]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:32:46]

Ya, silakan.

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:32:49]

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk segera melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya-tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa, TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, TPS 002 Desa Lontoi Kecamatan Siompu, TPS 002 Desa Batuawu Kecamatan Siompu, TPS 003 Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Molona ... Kelurahan Molona Kecamatan Batauga, TPS 002 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Bola Kecamatan Batauga, TPS 003 Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa, TPS 002 Desa Hendea

Kecamatan Sampolawa, TPS 003 Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa, TPS 001 Desa Lipumangau Kecamatan Sampolawa, dan TPS 001 Desa Bahari Dua Kecamatan Sampolawa, dan/atau melakukan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan di seluruh TPS Kabupaten Buton Selatan.

4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 bulan sejak diucapkan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

820. KETUA: SALDI ISRA [01:35:40]

Oke.

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:35:43]

Kuasa Hukum Pemohon.

822. KETUA: SALDI ISRA [01:35:44]

Oke, terima kasih. Ini kan ada dua alternative, ya.

Pertama seluruhnya di ... seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan. Yang kedua, di beberapa TPS saja, ya. Yang ketiga itu melakukan pemilihan ulang.

Apa bedanya pemungutan suara ulang dengan pemilihan ulang ini?

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:11]

Yang kami ... dalam pengertian kami (...)

824. KETUA: SALDI ISRA [01:36:13]

Saya uji pengetahuan umum Anda ini, soal kepemiluan.

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:15]

Ya, dalam pengertian kami, kalau pemilihan ulang itu di beberapa TPS, Yang Mulia.

826. KETUA: SALDI ISRA [01:36:23]

Kalau pemilihan ulang di beberapa TPS?

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:24]

Ya.

828. KETUA: SALDI ISRA [01:36:24]

Pemungutan suara ulang?

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:26]

Maaf, pemungutan suara ulang di beberapa TPS, Yang Mulia.

830. KETUA: SALDI ISRA [01:36:28]

Kalau pemilihan ulang?

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:29]

Pemilihan ulang, pemilihan serentak.

832. KETUA: SALDI ISRA [01:36:31]

Nah, apa bedanya dengan yang pertama tadi, itu? Ini kan ada juga nih, untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:46]

Ya, siap, Yang Mulia.

834. KETUA: SALDI ISRA [01:36:47]

Nah, jadi siap jadinya, kan? Nanti pelajari juga hukum kepemiluan kita itu dipelajari juga. Kalau pemungutan suara ulang itu bagaimana? Pemilu ulang bagaimana, ya?

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALIYUDIN [01:36:59]

Siap, Yang Mulia.

836. KETUA: SALDI ISRA [01:37:00]

Yang Mulia Pak Arsul, cukup?
Yang Mulia Pak Ridwan, cukup ya? Terima kasih.
Buton Selatan, 134, silakan.

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:36:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

838. KETUA: SALDI ISRA [01:37:18]

Ya.

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:01:18]

Assalamualaikum wr.wb.

840. KETUA: SALDI ISRA [01:37:21]

Walaikumsalam.

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:37:21]

Selamat pagi untuk kita semua.
Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Hardodi Law Firm. Dalam hal ini, mewakili Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan atas nama Hardodi, S.H., M.H., CLA., dan La Ode Amiruddin.

842. KETUA: SALDI ISRA [01:37:41]

Ya.

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:37:41]

Baik. Masuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

844. KETUA: SALDI ISRA [01:37:50]

Oke. Mahkamah berwenang?

845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:37:50]

Berwenang, Yang Mulia.
Kemudian, Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

846. KETUA: SALDI ISRA [01:37:53]

Tenggang waktu gimana ini?

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:37:56]

Tenggang waktu masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

848. KETUA: SALDI ISRA [01:37:59]

Kapan diumumkan ini?

849. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:37:59]

Diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Yang Mulia.

850. KETUA: SALDI ISRA [01:38:00]

4 Desember itu hari apa?

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:38:06]

Pukul 00.32 WITA, Yang Mulia.

852. KETUA: SALDI ISRA [01:38:08]

Ya, itu hari apa 4 Desember itu?

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:38:10]

Hari Rabu, Yang Mulia.

854. KETUA: SALDI ISRA [01:38:14]

Hari Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Anda majukan permohonan hari apa?

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:38:23]

Tanggal 7, 7 Desember, Yang Mulia.

856. KETUA: SALDI ISRA [01:38:23]

7 Desember itu hari apa? Berarti ini kan tanggalnya, kalau tanggal 4 Desember, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, oke?

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:38:37]

Ya.

858. KETUA: SALDI ISRA [01:38:37]

Ini Anda majukan tanggal 7? Di tanggal 6 di hari Jumat, Yang Mulia.

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:38:43]

Ya. Tanggal 6 Anda majukan?

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:38:47]

Ya, di hari Jumat, Yang Mulia.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:38:49]

Hari Jumat. Tanggal? Oke, ini biar klir dulu, ya.

Tanggal 4 Desember hari apa? Ada penanggalan enggak, kita? Tanggal 4 Desember itu Hari Rabu, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Anda mengajukan permohonan tanggal 6 atau tanggal 7? Tanggal 7. Bahwa permohonan diajukan hari Sabtu tanggal 7.

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:39:30]

Tanggal 7 Desember, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [01:39:31]

Oke, lanjut. Apa ini, Pokok Permohonannya apa?

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:39:37]

Kemudian, Pokok Permohonan adalah terkait adanya praktik politik uang secara terstruktur, sistematif, dan masif yang dilakukan oleh (...)

865. KETUA: SALDI ISRA [01:39:46]

Ya, bagaimana untuk praktiknya?

866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:39:48]

Baik, mungkin untuk praktiknya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

867. KETUA: SALDI ISRA [01:39:53]

Oke, silakan.

868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:39:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami sampaikan terkait dengan praktik sistematis, masif untuk politik uang. Kami perlu sampaikan bahwa di dalam Permohonan kami ini yang paling kami tekankan adalah praktik money politics yang terjadi di satu Kabupaten Buton Selatan, 70 desa/kelurahan.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:40:17]

Itu di mana diuraikan itu?

870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:19]

Ada diuraikan di (...)

871. KETUA: SALDI ISRA [01:40:21]

Halaman berapa?

872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:22]

Pokok Perkara, halaman 6, Yang Mulia.

873. KETUA: SALDI ISRA [01:40:26]

Oke. Yang ini? Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (...)

874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:29]

Ya (...)

875. KETUA: SALDI ISRA [01:40:29]

Memberi uang kepada pemilih (...)

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:30]

Betul, Yang Mulia.

877. KETUA: SALDI ISRA [01:40:31]

Rp150.000,00 sampai Rp200.000,00?

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:34]

Jadi, (...)

879. KETUA: SALDI ISRA [01:40:36]

Oke (...)

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:36]

Betul, Yang Mulia.

881. KETUA: SALDI ISRA [01:40:37]

Terus?

882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI

Praktik politik uang yang dilakukan di Kabupaten Buton Selatan dalam 70 desa/kelurahan dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Nomor Urut 3 atau Tim Kuasa Hukumnya, Yang Mulia.

883. KETUA: SALDI ISRA [01:40:56]

Tim Kuasa Hukum atau Tim Pemenangan?

884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:40:58]

Apa ... Tim Pemenangnya, Yang Mulia.

885. KETUA: SALDI ISRA [01:40:59]

Tim Kuasa Hukum, nanti Anda berkelahi dengan Kuasa Hukumnya (...)

886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:01]

Ya (...)

887. KETUA: SALDI ISRA

Nanti di sini.

888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:03]

Terkait dengan nominal, itu bervariasi, Yang Mulia.

889. KETUA: SALDI ISRA [01:41:06]

Ya.

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:07]

Yang kami lampirkan di dalam alat bukti, hanya beberapa foto.

891. KETUA: SALDI ISRA [01:41:11]

Ya.

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:12]

Terus peristiwa tersebut juga sudah dilaporkan di Bawaslu.

893. KETUA: SALDI ISRA [01:41:16]

Apa tanggapan Bawaslu?

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:12]

Tanggapan Bawaslu, belum memenuhi bukti.

895. KETUA: SALDI ISRA [01:41:21]

Oke.

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:22]

Tapi perlu kami sampaikan, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [01:41:21]

Ya.

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:23]

Ada beberapa saksi yang kami kumpulkan hari ini kurang-lebih 19.000 orang yang siap untuk bersaksi dan ketika mereka ... ketika mereka kami arahkan untuk melapor di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, justru kabupaten ... Bawaslu diduga ... diduga ya, salah satu oknum Komisioner di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyampaikan kepada pelapor atau yang ingin mengadu bahwa siapa yang menerima dan yang memberikan uang, itu juga akan dikenai sanksi.

Alasan inilah kemudian membuat masyarakat tidak bisa punya keberanian untuk membuat laporan di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. Kami menduga ada upaya kapitalisasi hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Buton Selatan, sehingga menggunakan norma hukum untuk menakuti-nakuti masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan itu. Kami yakin juga, Yang Mulia (...)

899. KETUA: SALDI ISRA [01:41:24]

Ya.

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:23]

Praktik masif money politics ini juga diketahui sebenarnya oleh penyelenggara KPU maupun juga Bawaslu.

901. KETUA: SALDI ISRA [01:41:35]

Oke, apa lagi?

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:36]

Namun (...)

903. KETUA: SALDI ISRA [01:41:37]

Itu (...)

904. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:38]

Buktinya kami sudah lampirkan ini, Yang Mulia.

905. KETUA: SALDI ISRA [01:41:39]

Ya.

906. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:41:38]

Terkait dengan bukti-bukti yang kami miliki, P1[*sic!*] ... P-4 ada yang membuktikan Nomor Urut 1. Kemudian P-2[*sic!*] ... P-5 membuktikan Nomor Urut 2. Dan di P-3, di P-7 membuktikan untuk Pasangan Nomor Urut 3.

907. KETUA: SALDI ISRA [01:42:02]

Oke, cukup?

908. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDODI [01:42:03]

Itu cukup, Yang Mulia. Untuk Petitumnya kami serahkan (...)

909. KETUA: SALDI ISRA [01:42:05]

Silakan. Silakan bacakan Petitumnya.

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:42:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Petitum yang pertama adalah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

911. KETUA: SALDI ISRA [01:42:14]

Ya.

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:42:15]

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan 2024.
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

913. KETUA: SALDI ISRA [01:42:43]

Ini kan 4 pasangan calon, ya?

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:42:45]

4 pasangan calon, Yang Mulia.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:42:46]

Anda Pasangan Calon Nomor 4. Yang Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 didiskualifikasi, begitu?

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:42:52]

Benar, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [01:42:53]

Nah ini kalau Anda batalkan, di mana suara Anda lagi? Kan, di Petition Nomor B ini membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716[*sic!*] tentang Penetapan Hasil. Dibatalkan ini?

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:44:10]

Dibatalkan.

919. KETUA: SALDI ISRA [01:44:12]

Ya kan? Lalu suara apa yang digunakan untuk menetapkan Pasangan Nomor 4 sebagai calon terpilih?

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:44:10]

Izin, Yang Mulia. Terkait Petitum yang ketiga, menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yang mulia.

921. KETUA: SALDI ISRA [01:44:20]

Ya, apa yang kita gunakan untuk menetapkan itu? Nggak ada suaranya lagi kan? Oke, jadi kalau bikin angka begini itu harus dibikin *sepanjang*. Nah, itu kuncinya satu.

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:44:36]

Baik, Yang Mulia.

923. KETUA: SALDI ISRA [01:44:38]

Ya. Ini supaya meningkat juga kemampuan hukum acaranya ini. Kalau enggak ini kan sudah batal nih, sudah hilang semua.

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:44:42]

Ya.

925. KETUA: SALDI ISRA [01:44:43]

Tiba-tiba Anda suruh tetapkan oleh kami, mana, suara apa yang kami mau tetapkan? Oke ya, cukup?

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAISAL [01:44:50]

Cukup. Yang Mulia.

927. KETUA: SALDI ISRA [01:44:53]

Terima kasih.

Kita lanjut sekarang ke Konawe Kepulauan.
Silakan ini pindah ke belakang, masuk ... apa ... rombongan baru.
Silakan. Silakan Konawe Kepulauan! Siapa yang mau menyampaikan?

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:45:15]

Assalamualaikum wr.wb.

929. KETUA: SALDI ISRA [01:45:17]

Waalaikumsalam wr.wb.

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:45:19]

Izin Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3.

Perkenankan kami, Law Office Tony Hasibuan and Partners bertindak untuk dan atas nama Paslon Nomor Urut 3.

931. KETUA: SALDI ISRA [01:45:46]

Oke.

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:45:47]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Konawe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

933. KETUA: SALDI ISRA [01:45:58]

Ini empat pasangan calon di situ, ya?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:45:59]

Ya, Yang Mulia. Selanjutnya (...)

935. KETUA: SALDI ISRA [01:46:02]

Peraih suara terbanyak Pasangan Calon Nomor 4?

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:03]

Ya.

937. KETUA: SALDI ISRA [01:46:04]

Peraih terbanyak kedua baru yang Saudara wakili?

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:08]

Betul, Yang Mulia.

939. KETUA: SALDI ISRA [01:46:09]

Oke, lanjut.
Berapa selisih suaranya?

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:14]

Sekitar 8.000-an, Yang Mulia.

941. KETUA: SALDI ISRA [01:46:18]

Suara Saudara memang (...)

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:19]

8.000 sekian (...)

943. KETUA: SALDI ISRA [01:46:21]

8.381.

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:24]

Maaf, Yang Mulia. Selisihnya sekitar 6.000-an.

945. KETUA: SALDI ISRA [01:46:26]

Kurang dari 6.000-an, ya?

946. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:27]

Ya.

947. KETUA: SALDI ISRA [01:46:28]

Oke, lanjut. Ini tidak memenuhi 158?

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:32]

Baik, Yang Mulia.

949. KETUA: SALDI ISRA [01:46:28]

Nah, apa yang menyebabkan kami harus menyimpangi 158 itu ... mengenyampingkan?

950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:39]

Ya, baik, Yang Mulia.
Ada pun, dasar Permohonan kami ini.

951. KETUA: SALDI ISRA [01:46:42]

Ya.

952. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:43]

Karena ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

953. KETUA: SALDI ISRA [01:46:52]

Apa pelanggarannya?

954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:53]

Ada pun dasar-dasar bentuk pelanggaran tersebut akan kami urai sebagai berikut, Yang Mulia.

955. KETUA: SALDI ISRA [01:46:58]

Ya, silakan.

956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:46:59]

Pertama.

13.1 itu adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas kepala desa, termasuk adanya pengerahan pengurus dan/atau kader-kader desa untuk berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, S.T dan M. Farid, S.E,.

957. KETUA: SALDI ISRA [01:48:18]

Oke.

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:48:19]

Yang kedua. Bahwa hasil rekapitu ... yang kedua, maaf, Yang Mulia.

959. KETUA: SALDI ISRA [01:48:25]

Ya.

960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:48:27]

Yang kedua bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi sai ... atas nama Rifqi Saifullah Razak, S.T. dan M. Farid, S.E, sangat dipengaruhi dengan pelanggaran mone po ... money politics dan manipulasi pemilih sebagai berikut. Nanti kami uraikan, Yang Mulia.

Yang ketiga bahwa hasil rekapitulasi C.Hasil Salinan KWK Bupati yang dijadikan dasar perhitungan oleh Termohon, ilegal atau tidak sah. nanti kami uraikan satu persatu, Yang Mulia.

961. KETUA: SALDI ISRA [01:48:56]

Oke.

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:48:57]

Yang keempat bahwa terdapat perbedaan dan selisih suara sah yang signifikan antara suara sah hasil dan rincian perhitungan suara di TPS dengan C.Hasil Salinan KWK Bupati. Akan kami uraikan selanjutnya, Yang Mulia.

963. KETUA: SALDI ISRA [01:49:16]

Oke, apalagi yang mau akan ... akan diuraikan, belum ada yang diuraikan ini?

964. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:49:18]

Baik, Yang Mulia. Ini kita (...)

965. KETUA: SALDI ISRA [01:49:20]

Ya.

966. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:49:20]

Akan uraikan, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [01:49:20]

Silakan.

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:49:21]

Terkait dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara itu dimulai sejak dua ribu ... November 2023, Yang Mulia.

969. KETUA: SALDI ISRA [01:49:31]

Oke.

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:49:31]

Itu bupati yang notabene adalah ayah kandung dari Calon Pasangan Nomor 4.

971. KETUA: SALDI ISRA [01:49:39]

Ya.

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:49:41]

Itu telah mempersiapkan pelaksana tugas ba ... untuk 51 desa dari 86 desa, Yang Mulia.

973. KETUA: SALDI ISRA [01:49:49]

Oke.

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:49:50]

Jadi, jumlah desa itu ada 86, jumlah kelurahan ada 7, sehingga seluruhnya 96 desa dan kelurahan. 51-nya itu adalah pelaksana tugas yang notabene adalah ASN, Yang Mulia, itu diangkat sejak November 2023, Yang Mulia.

975. KETUA: SALDI ISRA [01:50:03]

Oke.

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:50:05]

Kemudian ASN ini melakukan konsolidasi, dimana mereka memobilisasi massa untuk kampanye, bahkan mereka juga memungut iuran patungan dari masing-masing ASN untuk membiayai kampanye, maupun pemilihan bupati, Yang Mulia. Dan ini (...)

977. KETUA: SALDI ISRA [01:50:26]

Berapa iuran itu dipungut?

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:50:29]

Kisaran Rp500.000,00[sic!] sampai Rp3.500.000,00[sic!], Yang Mulia, itu ada bukti transfernya, Yang Mulia.

979. KETUA: SALDI ISRA [01:50:35]

Per orang?

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:50:37]

Per orang, Yang Mulia, tapi tidak sama. Ada yang 500, ada yang ... 3 juta ... sampai 3,5 juta, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [01:50:42]

Itu semua ASN begitu?

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:50:45]

ASN yang mendapat jabatan, Yang Mulia, terma ... yang wajib adalah plt ... pelaksana tugas itu wajib, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [01:50:51]

Wajib, ya?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:50:52]

Wajib bagi ... bagi pelaksana tugas, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [01:50:56]

Itu berapa ... berapa buktinya yang Anda miliki?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:50:58]

Bukti transfer itu ada 3, Yang Mulia, sekitar 3, Yang Mulia. Dan salah satu pelaksana tugas itu bersedia untuk dihadirkan menjadi saksi nanti, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [01:51:07]

Ya, itu nanti.

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:51:08]

Baik, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [01:51:09]

Kalau 3 jangan pakai kata *sekitar*, kalau 3 ya 3 saja. Kalau sekitar 3 itu, 3 setengah, 3,1 itu sekitar 3.

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:51:18]

Baik, Yang Mulia.

991. KETUA: SALDI ISRA [01:51:18]

Lanjut.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:51:19]

Biar lebih banyak, seolah-olah gitu, ya.

993. KETUA: SALDI ISRA [01:51:22]

Ya, Anda mau (...)

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:51:23]

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia.

995. KETUA: SALDI ISRA [01:51:24]

Oke, lanjut.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: MULYADI [01:51:25]

Selanjutnya, Yang Mulia, pelaksana tugas ini mengintimidasi kader-kader desa, Yang Mulia, dengan mereka mengancam untuk memberhentikan mereka, apabila tidak memilih, Yang Mulia.

Kemudian, ada rekaman juga salah satu pelaksana tugas, yaitu di Desa Pasir Putih. Di dalam rekaman itu, pelaksana tugas itu menyampaikan bahwa mereka sudah disetting menjadi pelaksana tugas, itu dari 2023 sampai 2025, Yang Mulia. Jadi, mereka bisa mengelola 2 tahun mata anggaran, Yang Mulia. Dan itu dia bilang bahwa siapa pun bupati yang terpilih, dia akan tetap menjadi pelaksana tugas karena memang di 2025 ini tidak dianggarkan oleh bupati untuk melakukan pemilihan kepala desa, Yang Mulia.

997. KETUA: SALDI ISRA [01:52:19]

Oke.

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:52:20]

Sehingga sudah pasti mereka akan sampai di 2025 menjadi pelaksana tugas.

999. KETUA: SALDI ISRA [01:52:22]

Pokoknya siapa pun terpilih, mereka akan jadi Pj, ya.

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:52:26]

Dan mengelola APBDes, Yang Mulia.

1001. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Termasuk pasangan calon yang Saudara wakili?

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:52:31]

Tidak, Yang Mulia. Oh, ya, termasuk, Yang Mulia.

1003. KETUA: SALDI ISRA [01:52:33]

Kan, Anda mengatakan siapa saja, termasuk yang Saudara wakili juga.

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:52:36]

Termasuk itu, Yang Mulia.

1005. KETUA: SALDI ISRA [01:52:37]

Oke, lanjut!

1006. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:52:39]

Selanjutnya, Yang Mulia. Keterlibatan ASN ini juga dalam membuat posko, Yang Mulia. Membuat posko pemenangan di rumahnya pelaksana tugas dan kepala desa, Yang Mulia. Sehingga ASN ini keterlibatannya cukup aktif, Yang Mulia.

1007. KETUA: SALDI ISRA [01:53:00]

Ada dilaporkan ke Bawaslu, enggak?

1008. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:02]

Sudah ada, Yang Mulia. Bahkan kita melaporkan bupati ke Bawaslu provinsi, Yang Mulia.

1009. KETUA: SALDI ISRA [01:53:06]

Oke, apa putusannya?

1010. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:08]

Belum, belum ada putusan, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [01:53:11]

Nah, nanti kita tanya Bawaslu nanti. Ada lagi?

1012. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:13]

Terkait dengan money politics. Ini money politics ini, Yang Mulia, Rp500.000,00 per kepala, Yang Mulia.

1013. KETUA: SALDI ISRA [01:53:24]

Oke.

1014. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:25]

Kemudian ada ... apa namanya ... Yang Mulia, ada semacam joki, Yang Mulia. Joki pemilih, Yang Mulia.

1015. KETUA: SALDI ISRA [01:53:33]

Oke.

1016. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:34]

Jadi, ada (...)

1017. KETUA: SALDI ISRA [01:53:35]

Ada bisnis baru dalam pemilu, ya?

1018. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:36]

Yes, setuju, Yang Mulia. Ada joki, Yang Mulia. Dan ini ada saksinya dan sudah ditambahkan, Yang Mulia, dalam affidavit, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [01:53:46]

Itu joki dalam pemilu itu sama dengan joki UNPTN itu, enggak?

1020. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:51]

Kurang lebih sama, Yang Mulia.

1021. KETUA: SALDI ISRA [01:53:52]

Oke. Jadi, ini tukang pandu, ya?

1022. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:54]

Betul.

1023. KETUA: SALDI ISRA [01:53:55]

Kalau saya pilih ini, Anda pilih ini juga.

1024. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:53:56]

Nah, betul.

Selanjutnya, terkait dengan C-1 ini, Yang Mulia.

1025. KETUA: SALDI ISRA [01:54:01]

Ya.

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:02]

Kita saksi kita di masing-masing TPS hanya mendapat 9 ... hanya mendapat C-1 asli, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [01:54:10]

Oke.

1028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:12]

Dari 99 TPS yang ada, Yang Mulia, itu kita hanya menerima 9 C-1 asli.

1029. KETUA: SALDI ISRA [01:54:19]

Kami. Jangan kita. Nanti Hakim terbawa-bawa dalam rombongan Saudara nanti.

1030. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:23]

Kami menerima hanya 9 asli, yang 90-nya tidak asli, Yang Mulia.

1031. KETUA: SALDI ISRA [01:54:30]

Oke.

1032. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:31]

Makanya kita mau renvoi ini bukan 90%, Yang Mulia. Maksudnya 90 TPS di halaman 14 itu, Yang Mulia.

1033. KETUA: SALDI ISRA [01:54:34]

Tidak boleh lagi ada renvoi.

1034. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:36]

Baik, Yang Mulia. Ya, kurang lebih 90% juga jumlahnya, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [01:54:41]

Oke, lanjut!

1036. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:42]

Kita anggap ilegal (...)

1037. KETUA: SALDI ISRA [01:54:42]

Kami. Baru juga, Anda ubah lagi.

1038. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:45]

Kami, Yang Mulia. Kami menganggap itu C-1 ilegal.

1039. KETUA: SALDI ISRA [01:54:48]

Ya.

1040. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:54:49]

Bahkan ada perintah dari KPU, turun perintah dari KPU, Yang Mulia, untuk meminta kembali tanda tangan di C-1 bagi saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kami wakili, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [01:55:04]

Oke.

1042. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:55:05]

Jadi, setelah ini bermasalah, kita komplain di Pleno. Akhirnya mereka, kita laporkan ke Bawaslu. Bawaslu menerbitkan surat, memerintahkan kepada KPU untuk memberikan C-1 asli. Dan karena tidak ada C-1 asli itu, ada turun perintah ke PPK dan PPS, sampai ke KPPS, untuk mengulangi tanda tangan C-1, Yang Mulia, meminta kepada saksi-saksi Paslon Nomor 3. Tapi itu tidak terlaksana. Sampai sekarang kita tidak menerima yang asli, Yang Mulia.

1043. KETUA: SALDI ISRA [01:55:32]

Oke, ada lagi? Cukup?

1044. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:55:34]

Cukup, Yang Mulia.

1045. KETUA: SALDI ISRA [01:55:35]

Nah, langsung Petitum!

1046. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:55:40]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian yang di atas, kami mohonkan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Pemilihan Hasil ... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifki Saifullah Razak,

S.T. dan Farid S.E., karena terbukti melibatkan Aparat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024.

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di tujuh kecamatan sebagai Daerah Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

1047. KETUA: SALDI ISRA [01:56:49]

Ini Pemilihan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang? Di angka 4 itu.

1048. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:56:56]

Pemilihan, Yang Mulia.

1049. KETUA: SALDI ISRA [01:56:58]

Yang sebenarnya itu Pemungutan Suara Ulang, ya.

1050. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:56:59]

Baik, Yang Mulia.

1051. KETUA: SALDI ISRA [01:57:01]

Kalau pemilihannya, pemilihan ulang. Oke.

1052. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:57:03]

Baik, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [01:57:04]

Itu istilahnya. Cukup, ya?

1054. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [01:57:08]

Cukup, Yang Mulia.

1055. KETUA: SALDI ISRA [01:57:10]

Terima kasih. Ini Konawe Kepulauan, sekarang kita masuk ke Pegunungan Bintang. Silakan Kuasa Hukum Pegunungan Bintang Nomor 228.

1056. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:57:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

1057. KETUA: SALDI ISRA [01:57:33]

Silakan.

1058. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:57:33]

Yang Mulia, sebelumnya kami sampaikan bahwa permohonan ... Perbaikan Permohonan lewat waktu, sehingga yang kami sampaikan adalah Permohonan yang pertama.

1059. KETUA: SALDI ISRA [01:57:42]

Oke (...)

1060. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:57:44]

Sesuai dengan (...)

1061. KETUA: SALDI ISRA [01:57:45]

Sila ... sesuai dengan ketentuan hukum acara.

1062. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:57:48]

Ya.

1063. KETUA: SALDI ISRA [01:57:49]

Silakan.

1064. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:57:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami bertindak untuk dan atas nama Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman.

1065. KETUA: SALDI ISRA [01:57:50]

Ini Lawyer yang jujur ini, perlu ditiru oleh yang lain. Ya, kalau enggak, kadang-kadang mau pula bersitegang leher dengan Hakim itu. Padahal sudah lewat waktu, kan. Nah, ini diakui, supaya semua paham nanti, yang mana yang harus dijawab, ya. Silakan, Bapak.

1066. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:58:13]

Terima kasih, ya. Kami bertindak untuk atas nama kedua Pemohon tadi. Yang adalah bakal calon, bukan calon, tapi bakal calon.

1067. KETUA: SALDI ISRA [01:58:18]

Ya.

1068. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:58:18]

Mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU Pegunungan Bintang tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang.

Berkeenan dengan Kewenangan Mahkamah, kami tidak bacakan, dianggap dibacakan dan Mahkamah berwenang untuk itu.

1069. KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]

Silakan, ke Pokok Permohonan saja.

1070. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:58:46]

Ya, langsung ke ke Pokok Permohonan.

1071. KETUA: SALDI ISRA [01:59:00]

Ya.

1072. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:59:06]

Pemohon, mendaftarkan diri sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, ada dua tahap pendaftaran. Pemohon mendaftarkan diri lewat Sionkada sebagai syarat untuk pendaftaran selanjutnya.

1073. KETUA: SALDI ISRA [01:59:06]

Ya.

1074. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:59:13]

Kemudian setelah selesai melakukan input data, syarat calon, dan syarat ... syarat pencalonan, dan syarat calon.

1075. KETUA: SALDI ISRA [01:59:20]

Ya.

1076. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:59:21]

Kemudian pada tanggal 29 Agustus, ketika hendak mendaftarkan diri secara fisik, mengajukan per ... mengantarkan berkas ke Pihak Termohon, maka terjadi penghadangan, intimidasi, dan penganiayaan. Sehingga tidak bisa mendaftarkan diri secara langsung pada tanggal 29 Agustus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1077. KETUA: SALDI ISRA [01:59:45]

Ya.

1078. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:59:45]

Kemudian Pemohon telah mempersoalkan ini ke Bawaslu, mengajukan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu, tapi kemudian tidak ... dianggap ... tidak ditanggapi untuk melakukan mediasi (...)

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:00:01]

Ya.

1080. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:00:01]

Untuk memberi ruang untuk pendaftaran kepada Pemohon. Ke Bawaslu pun tidak ada tindak lanjut karena dianggap tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Sekalipun, telah disampaikan pengaduan sesuai dengan waktu yang berlaku.

Itulah setidaknya-tidaknnya pokok-pokok dari, inti dari Permohonan dari Pemohon ini.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:00:21]

Oke.

1082. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:00:21]

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang.

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:00:54]

Oke.

1084. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:00:54]

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:01:07]

Terima kasih. Jadi ini bakal calon, tapi tidak bisa karena ada proses pengadangan[sic!], sehingga waktunya lewat, tidak bisa mengajukan diri, ya?

1086. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:01:09]

Betul.

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:01:11]

Sudah mengajukan permohonan keberatan, tapi tidak ditanggapi oleh Bawaslu. Tolong ini dijelaskan oleh apa ... oleh KPU, kenapa kejadian seperti ini? Dan kita pernah punya putusan di Mahkamah Konstitusi, orang yang tidak calon itu, pernah kita suruh masukkan jadi calon, kalau alasan-alasannya kuat. Nah, itu yang akan kami nilai nanti. Jadi, yang disampaikan di Permohonan ini nanti akan dijelaskan oleh KPU dan akan dijelaskan juga oleh Bawaslu.

Cukup ya, Pak, ya?

1088. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:01:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:01:51]

Ya, terima kasih.

Kita lanjut sekarang ke 244, Kabupaten Pegunungan Bintang juga. Silakan.

1090. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:02:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

1091. KETUA: SALDI ISRA [02:02:12]

Walaikumsalam.

1092. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:02:13]

Kami dari Kantor Hukum LMN & Rekan, mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Izin, Yang Mulia, ada kesalahan penulisan di halaman awal, seharusnya Nomor Urut 4, itu juga berdasarkan Surat Kuasa. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor.

Mengenai Kewenangan, Mahkamah Konstitusi berwenang. Kemudian Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan, masih dalam tenggat waktu.

1093. KETUA: SALDI ISRA [02:02:39]

Ya.

1094. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:02:39]

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum. Meskipun kami melewati ambang batas karena ambang batasnya itu 1.945 suara, meskipun selisih suara kami dengan pasangan calon peraih suara terbanyak itu 14.149.

1095. KETUA: SALDI ISRA [02:03:01]

Oke.

1096. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:03:01]

Hal itu terjadi karena ada 2 legal issue dalam Pokok Permohonan kami.

Yang pertama, itu proses pemilihan tidak dilaksanakan sesuai dengan one man one vote dan masih dilaksanakan sistem noken. Padahal dalam Keputusan KPU 1774[*sic!*] Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi memakai sistem noken. Dan itu terjadi di 11 ... distrik, 7 distrik dan 14 TPS yang kami dapatkan datanya secara terbatas.

1097. KETUA: SALDI ISRA [02:03:36]

Berapa distrik di Pegunungan Bintang ini?

1098. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:03:38]

36 distrik, Yang Mulia.

1099. KETUA: SALDI ISRA [02:03:40]

36 distrik.

1100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:03:42]

Yang kami dapatkan datanya.
Mohon izin saya jelas (...)

1101. KETUA: SALDI ISRA [02:03:45]

Kemudian ... sabar, satu. Yang kedua, di berapa distrik yang dilakukan model noken itu?

1102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:03:52]

Model noken itu di 11 distrik, Yang Mulia.

1103. KETUA: SALDI ISRA [02:03:59]

11 distrik. Sebentar, ya.

1104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:00]

7 distrik, Yang Mulia. Izin, 7 distrik.

1105. KETUA: SALDI ISRA [02:04:00]

Ini harus pasti-pasti ini, 7 Distrik model noken?

1106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:03]

Ya, Yang Mulia.

1107. KETUA: SALDI ISRA [02:04:06]

Dari 7 distrik itu terjadinya di berapa TPS?

1108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:09] [02:04:09]

13 TPS, Yang Mulia.

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:04:11]

13 TPS. Oke, lanjut!

1110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:16]

Izin, Yang Mulia.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:04:19]

Ya.

1112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:20]

Untuk legal isu terakhir. Bahwasannya tidak terdapat pemilihan yang terjadi di tingkat TPS dan tidak terdapat pleno di tingkat TPS dan tingkat kecamatan. Jadi pleno hasil itu hanya terjadi di tingkat kabupaten dan kami tidak mendapatkan alat-alat bukti dan berkas pemungutan dan penghitungan suara, ya sebagaimana hak kami, dan itu hanya kami dapatkan di tingkat Kabupaten. Dan itupun, Yang Mulia, kami dikirimkan file-nya saja, Yang Mulia.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:04:47]

Tidak diundang untuk hadir?

1114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:49]

Ya, Yang Mulia. Diundang, Yang Mulia. Untuk pleno di tingkat Kabupaten saja, Yang Mulia.

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:04:53]

Diundang hadir, ya?

1116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:54]

Ya, Yang Mulia.

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:04:55]

Kalau di distrik, enggak ada?

1118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:56]

Tidak ada pleno, Yang Mulia.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:04:57]

Di semua distrik?

1120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:04:58]

Ya, ya ... hanya di ibukota Kabupaten saja, Yang Mulia. Di Oksibil[sic!].

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:05:03]

Oke, berarti itu kan semua distrik enggak diundang. Kan ada juga penetapan di tingkat distrik, kan?

1122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:05:08]

Ya, Yang Mulia.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:05:09]

KPU, mana KPU? Pegunungan Bintang? Ada penetapan di tingkat distrik juga, kan? Ada, ya?

1124. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:05:17]

Izin, Yang Mulia, semua kita lakukan di distrik.

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:05:22]

Oke, nanti dijelaskan. Nanti ada ... ada waktu untuk menjelaskannya. Oke, ada yang lain?

1126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:05:25]

Ya, Yang Mulia.

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:05:26]

Langsung ke Petitum!

1128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:05:27]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:05:28]

Ya.

1130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:05:28]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:05:42]

Ya.

1132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:05:43]

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara

ulang di seluruh tempat pemungutan suara Kabupaten Pegunungan Bintang.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:06:12]

Oke, itu dari 36 distrik tadi, kan 7 distrik model noken, ya?

1134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:06:17]

Ya, Yang Mulia.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:06:18]

29 distrik lagi model biasa?

1136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:06:20]

Kami belum mendapatkan ini, Yang Mulia, keterangan terkait proses pelaksanaannya, yang jelas kami tidak mendapatkan C.Hasil Salinan.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:06:28]

Oke, jadi ini yang Anda persoalkan yang dapat saja Model C.Hasil Salinannya, ya?

1138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:06:33]

Ya, Yang Mulia, terbatas alat bukti kami.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:06:35]

Makanya Anda ... pokoknya sudahlah diminta semuanya diulang waktu[sic!] itu, ya?

1140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:06:40]

Ya, Yang Mulia. Karena kami tidak mendapatkan C.Hasil Salinan, semuanya, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:06:43]

Oke, cukup.
Yang Mulia Pak Arsul.

1142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:47]

Oke, sedikit ini, ya. Itu ... apa ... Paslon Anda itu punya saksi juga? Di TPS, di masing-masing distrik?

1143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:00]

Punya saksi, Yang Mulia.

1144. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:01]

Punya saksi, kan tadi tidak ada pleno, tidak ada apa, terus kemudian ada pengaduan ke Bawaslu?

1145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:08]

Tidak ada pengaduan, Yang Mulia.

1146. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:09]

Kenapa enggak diadukan?

1147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:11]

Mereka tidak tahu mengadukan apa, Yang Mulia. Karena tidak ada terjadi pemilihan, Yang Mulia.

1148. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:12]

Lah, ya. Bukan, itu tadi bukan yang di 7 distrik. Makanya pertanyaan saya adalah di seluruh distrik yang lain itu ada pleno enggak?

1149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:24]

Eenggak ada pleno, Yang Mulia.

1150. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:26]

Jadi tidak ada pleno di tingkat distrik maupun di tingkat TPS?

1151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:31]

Ya, Yang Mulia, Tidak ada, Yang Mulia.

1152. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:33]

Termasuk yang di 7 distrik itu?

1153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:35]

Ya, Yang Mulia.

1154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:36]

Pertanyaan saya, makanya tadi kan ada saksi, Anda enggak ada, kemudian protes, kenapa kok enggak ada pleno?

1155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:07:45]

Karena tidak ada pemilihan, Yang Mulia.

1156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:48]

Lho, ya itu. Eenggak ada pemilihan kan satu hal, tapi kemudian kan walaupun enggak ada pemilihan, katakanlah noken semua saja, itu kan mestinya tetap ada pleno di tingkat distrik.

1157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:08:00]

Tidak ada Pleno, Yang Mulia. Di tingkat TPS dan distik.

1158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:00]

Lah ya, kalau tidak ada pleno, Saksi Anda kemudian protes, enggak? Atau paslon Andalah?

1159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHRAM [02:08:07]

Tidak melaporkan ke Bawaslu.

1160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:09]

Tidak melaporkan ke Bawaslu, oke.
Ya, cukup, Pak Ketua.

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:08:13]

Terima kasih.
Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya? Terima kasih.
Sekarang ditukar giliran masuk momen baru, yang 254 dan 275. Silakan, Kuasa 254 Kabupaten Kaimana dan Kuasa 275 Kabupaten Yalimo. Sudah dipersilakan Kuasa untuk permohonan Nomor 254 Kabupaten Kaimana.

1162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:09:19]

Izin, Yang Mulia.

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:09:20]

Ya.

1164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:09:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:09:25]

Walaikumsalam.

1166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:09:26]

Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami muliakan Ketua Panel dan Anggota Majelis Panel Hakim Konstitusi.

Izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara 254 Kabupaten Kaimana.

Sebelumnya, Yang Mulia, kami juga sudah menyampaikan PPT. Mohon juga untuk bisa ditayangkan.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:09:53]

Silakan ditayangkan PPT-nya. PPT-nya sama dengan permohonan, ya?

1168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:09:56]

Sama, Yang Mulia.

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]

Oke.

1170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:09:58]

Kemudian nanti kami juga ada bukti tambahan, Yang Mulia.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:10:00]

Oke.

1172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:10:02]

Mempersingkat waktu, Yang Mulia. Kami langsung saja, permohonan ini diajukan oleh Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, yaitu Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.

Memberikan kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan. Kami yang hadir di sini Muhammad Imam Nasef dan juga Ahmad Matdoan.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:10:28]

Ya.

1174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:10:29]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, MK Berwenang, Yang Mulia.
Kemudian, masih dalam tenggang waktu.
Kemudian, legal standing. Kami perlu sampaikan, Yang Mulia.
Bahwa memang ini melebihi ambang batas lebih sedikit saja, Yang Mulia.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:10:47]

Berapa lebihnya ini? Harusnya berapa?

1176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:10:49]

Harusnya 2%, Yang Mulia.

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:10:51]

Ya, 2% nya itu berapa?

1178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:10:51]

614.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:10:56]

614. Sekarang selisihnya?

1180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:10:58]

921, Yang Mulia.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:10:59]

921.

1182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:01]

Jadi, lebih 0,9%.

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:11:03]

Kalau dari suaranya itu berapa?

1184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:04]

921, Yang Mulia.

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:11:07]

307, ya, bedanya.

1186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:10]

Tiga ... bedanya 614, Yang Mulia.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:11:12]

Ya.

1188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:12]

Kalau sesuai dengan 2%, tetapi faktanya bedanya 921.

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:11:18]

Beda suaranya 307 suara, betul? 921 dikurang 614 begitu, ya?

1190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:24]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:11:26]

Oke, lanjut.

1192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:26]

Namun demikian, kami mohon untuk bisa dikesampingkan ketentuan ambang batas a quo karena memang terjadi pelanggaran

yang sangat mendasar dan fundamental, khususnya terkait dengan syarat pencalonan dan juga calon, serta pelanggaran-pelanggaran (...)

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:11:43]

Silakan mulai, syarat pencalonan apa yang tidak terpenuhi?

1194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:47]

Izin kami menyampaikan. Yang pertama terkait dengan syarat pencalonan, Yang Mulia.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:11:51]

Mana powerpoint-nya itu? Sudah ditayangkan, belum? Belum diterima kata Panitera itu.

1196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:11:59]

Kami sudah e-mail, Yang Mulia. Tapi enggak apa-apa, kami bacakan saja, Yang Mulia.

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:12:01]

Ya.

1198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:12:01]

Terima kasih.
Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan fakta-faktanya terlebih dahulu. Di tanggal 15 Agustus 2024, kami mendapat surat keputusan dari Partai Amanat Nasional Nomor 604 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang itu kemudian juga dituangkan dalam Model B.Persetujuan.Parpol.KWK.

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:12:22]

Oke.

1200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:12:24]

Kemudian, pada tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon juga mendapatkan dukungan dari gabungan koalisi partai, yang kemudian itu dituangkan dalam model B.Pencalonan.Parpol.KWK. Dan di situ juga ada Partai Amanat Nasional, di mana di dalam Model B.Pencalonan.Parpol.KWK itu, ada pernyataan juga yang menyatakan bahwa tidak akan menarik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah didaftarkan.

Kemudian, pada tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon bersama (...)

1201. KETUA: SALDI ISRA [02:12:56]

Ini sebentar, ini Pemohon didukung setelah pertamanya PAN, tiba-tiba dapat tambahan dukungan dari Demokrat, PDIP, Golkar, Nasdem, PSI, Hanura, PKB, Gerindra, PP, PKN, gitu ya?

1202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:13:08]

Bukan, Yang Mulia.

Dari awal memang koalisi Parpol ini mendukung. Cuma memang yang bermasalah di sini adalah Partai Amanat Nasional.

1203. KETUA: SALDI ISRA [02:13:15]

Oke.

1204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:13:16]

Dukungan dari Partai Amanat Nasional.

1205. KETUA: SALDI ISRA [02:13:18]

Terus.

1206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:13:19]

Lanjut, pada tanggal 29 Agustus 2024.

1207. KETUA: SALDI ISRA [02:13:23]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:13:24]

Gabungan koalisi melakukan pendaftaran dan dinyatakan diterima.

1208. KETUA: SALDI ISRA [02:13:26]

Oke.

1209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:13:27]

Namun demikian, karena memang hanya pasangan, hanya 1 pasangan calon yang mendaftar, maka ada perpanjangan antara tanggal 2 sampai 4 September 2024.

Nah kemudian, di tanggal 2 September 2024, tiba-tiba DPP Partai Amanat Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 983 Tahun 2024 dan seterusnya, tentang Pembatalan Persetujuan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana. Di hari yang sama, DPP Partai Amanat Nasional juga mengeluarkan Keputusan Nomor 984 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dengan mengusung Pasangan Calon atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi, yaitu Pihak Terkait.

1210. KETUA: SALDI ISRA [02:14:15]

Oke (...)

1211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:14:16]

Kemudian (...)

1212. KETUA: SALDI ISRA [02:14:17]

Jadi, ini nyempil 1, ya?

1213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:14:18]

Nyempil, jadi (...)

1214. KETUA: SALDI ISRA [02:14:19]

Keluar (...)

1215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:14:19]

Keluar 1 (...)

1216. KETUA: SALDI ISRA [02:14:20]

Gabung dengan yang lain (...)

1217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:14:20]

Gabung dengan yang lain, Yang Mulia.

1218. KETUA: SALDI ISRA [02:14:21]

Oke.

1219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:14:22]

Kemudian pada tanggal 4 September 2024, Pihak Terkait kemudian bersama koalisinya mendaftar ke KPU. Namun kemudian, oleh KPU Termohon berkasnya dikembalikan karena tidak memenuhi syarat batas 10% minimal suara yang sah.

1220. KETUA: SALDI ISRA [02:14:38]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:14:39]

Kemudian pada tanggal 4 September 2024, Termohon mengirimkan surat perihal tentang Permintaan Audiensi yang diajukan kepada Pemohon. Pada saat itu Pemohon juga hadir, namun dengan tegas dalam pertemuan itu Pemohon menolak adanya pencabutan dukungan itu, Yang Mulia.

Kemudian di tanggal (...)

1221. KETUA: SALDI ISRA [02:15:01]

Sebentar dulu, ini biar clear. Setelah bergabung PAN, Partai Buruh, PKS, Perindo, Partai Ummat, ini mendaftarkan Pak Achmad ... Pak Hasan Achmad, ya?

1222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:11]

Betul, Yang Mulia.

1223. KETUA: SALDI ISRA [02:15:12]

Itu tidak cukup 10%?

1224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:13]

Tidak cukup karena dianggap PAN ini sudah mendukung (...)

1225. KETUA: SALDI ISRA [02:15:18]

Oh, oke (...)

1226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:19]

Pemohon di awal (...)

1227. KETUA: SALDI ISRA [02:15:19]

Karena dianggap PAN itu sudah di sana (...)

1228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:20]

Sudah, ke sana (...)

KETUA: SALDI ISRA [02:15:21]

Tapi begitu PAN masuk ke sini, jadi cukup?

1229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:23]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:15:23]

Oke, lanjut.

1230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:24]

Gitu, Yang Mulia.
Kemudian di tanggal 11, itu ada surat dari KPU RI, nomor sekian-sekian, dianggap dibacakan.

1231. KETUA: SALDI ISRA [02:15:33]

Ya.

1232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:34]

Kemudian, ada juga surat dari KPU Provinsi Papua Barat, tanggal 12 September 2024.
Kemudian, tanggal 14, itu memang ada mediasi, Yang Mulia.

1233. KETUA: SALDI ISRA [02:15:44]

Ya.

1234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:15:45]

Jadi, Pihak Terkait itu mengajukan laporan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu ada mediasi. Dalam mediasi itu intinya Termohon menerima pendaftaran itu. Dan akhirnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon di situ.

Nah, itu menurut kami, Yang Mulia, jelas melanggar Undang-Undang Pilkada dan juga PKPU, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang 1/2015, dan juga Undang-Undang PKPU (...)

1235. KETUA: SALDI ISRA [02:16:16]

Oke.

1236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:16]

Tentang pencalonan, Yang Mulia.

1237. KETUA: SALDI ISRA [02:16:17]

Ini jangan-jangan gara-gara Putusan 60 ini.

1238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:18]

Nah, justru (...)

1239. KETUA: SALDI ISRA [02:16:19]

Ya kan, setelah putusan 60, ya?

1240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:23]

Sebelum ... Setelah, jadi Putusan 60 itu tanggal 20 Agustus.

1241. KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]

Ya.

1242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:27]

Harusnya kalau memang mau mendasarkan itu kan PAN bisa saja, di awal enggak usah mencalonkan, kira-kira gitu, Yang Mulia.

1243. KETUA: SALDI ISRA [02:16:32]

Oke, lanjut!

1244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:34]

Itu, Yang Mulia, sehingga menurut kami ini sebuah pelanggaran yang sangat prinsip yang tentu kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk bisa mencermati lebih lanjut.

1245. KETUA: SALDI ISRA [02:16:47]

Oke, lanjut. Itu satu hal. Hal lain apa lagi?

1246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:48]

Kemudian yang kedua juga, ada terkait dengan syarat calon, Yang Mulia (...)

1247. KETUA: SALDI ISRA [02:16:49]

Ya.

1248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:51]

Karena Pihak Terkait ini ternyata mendaftarkan itu menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku.

1249. KETUA: SALDI ISRA [02:16:58]

Oh, KTP-nya?

1250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:16:58]

KTP-nya, Yang Mulia. Karena sesuai dengan pengecekan kami, sekarang itu domisili KTP-nya itu ada di Cileunyi Bandung, Yang Mulia.

1251. KETUA: SALDI ISRA [02:17:06]

Oke.

1252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:17:07]

Tapi mendaftar dengan KTP Kaimana.
Kemudian, yang berikutnya Nomor 3, Yang Mulia, yaitu ketidaknetralan Plt Bupati sekaligus sebagai wakil bupati definitif, melakukan kampanye di luar cuti dan lain sebagainya, Yang Mulia.

1253. KETUA: SALDI ISRA [02:17:21]

Oke.

1254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:17:22]

Selengkapnya mohon dianggap dibacakan.

1255. KETUA: SALDI ISRA [02:17:23]

Oke, lanjut!

1256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:17:24]

Kemudian, berikutnya lagi Nomor 4.

Ada ketidaknetralan ASN dengan membuat grup WhatsApp ASN For HAI. Nah, beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terkait, yaitu melakukan perekrutan baik, pada ASN maupun masyarakat Kabupaten Kaimana untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1. Kemudian, melakukan pertemuan-pertemuan membahas program kerja, visi, misi, dan membuat jadwal dan penanggung jawab kegiatan pemenangan, melakukan penggalangan dana, membiayai kegiatan pemenangan, melakukan sosialisasi visi, misi Pasangan Calon Nomor 1 kepada masyarakat dan membuat atribut baju yang bertulis ASN For HAI. Jadi sudah sangat terang-terangan, Yang Mulia.

1257. KETUA: SALDI ISRA [02:18:02]

Ada bajunya dibawa enggak?

1258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:05]

Fotonya saja, Yang Mulia.

1259. KETUA: SALDI ISRA [02:18:07]

Kalau ada bajunya nanti saya pakai juga.

1260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:10]

Jika dimungkinkan nanti akan kami bawakan sampelnya, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya, Yang Mulia, kami juga mengidentifikasi beberapa pelanggaran yang ada di dalam TPS. Sebenarnya kami sudah identifikasi di dalam PowerPoint itu untuk memudahkan, Yang Mulia.

1261. KETUA: SALDI ISRA [02:18:31]

Ya.

1262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:32]

Kami bacakan saja.

1263. KETUA: SALDI ISRA [02:18:32]

Ya, silakan!

1264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:34]

Pertama, di TPS 1 Kampung Oray dan Distrik Kaimana Kota. Pelanggaran pemilihannya adalah dilakukan oleh Tonche Oru dan Rodek Oru selaku anggota KPPS dengan cara para pemilih dipanggil satu persatu lalu Tonche Oruw dan Rodek Oruw ini yang melakukan pencoblosan. Jadi bukan pemilih yang melakukan, Yang Mulia.

1265. KETUA: SALDI ISRA [02:18:52]

Ada buktinya itu?

1266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:53]

Ada, Yang Mulia. Dari Bukti P-35 sampai dengan P-83. Kemudian yang kedua, di TPS 1 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas. Anggota KPPS atas nama Yanes Syakema secara tidak sah mencoblos 8 kertas surat suara dan juga melakukan pencoblosan atas nama Leonardo Syakema dan istri Ibu L.E. Ubawarin.

1267. KETUA: SALDI ISRA [02:19:18]

Ini ada laporan Bawasluanya?

1268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:19:19]

Ada, Yang Mulia.

1269. KETUA: SALDI ISRA [02:19:21]

Tidak ada tindak lanjut?

1270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:19:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

1271. KETUA: SALDI ISRA [02:19:35]

Oke.

1272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:19:37]

Kemudian di TPS 4 Kampung Trikora, Distrik Kaimana. Pemilih atas nama Hardianti Litoli ber-KTP-el Kabupaten Fak Fak, tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kaimana tapi menggunakan hak pilihnya.

1273. KETUA: SALDI ISRA [02:19:38]

Oke.

1274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:19:42]

Kemudian di TPS 17 Distrik Kaimana, sebanyak 6 orang terdaftar DPT online di luar Kabupaten Kaimana, tetapi diperbolehkan mencoblos. Atas kejadian ini, KPPS telah menolak yang bersangkutan tetapi panitia pemilihan distrik itu justru mengizinkan, Yang Mulia.

1275. KETUA: SALDI ISRA [02:19:58]

Oke.

1276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:19:59]

Kemudian, berikutnya lagi di TP1 Kampung Sisir Distrik Kaimana, pemilih atas nama Gerson Yaru melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS tersebut dan yang bersangkutan tertangkap tangan oleh panitia pengawas dan telah mengakui perbuatannya. Berikut (...)

1277. KETUA: SALDI ISRA [02:20:14]

Enggak ada PSU di sini?

1278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:16]

Tidak, Yang Mulia.

1279. KETUA: SALDI ISRA [02:20:17]

Enggak ada laporan juga?

1280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:19]

Ada tertangkap tangan ini, Yang Mulia, cuma memang tidak ada tindak lanjut.

1281. KETUA: SALDI ISRA [02:20:22]

Oke, enggak (...)

1282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:22]

Ada temuan (...)

1283. KETUA: SALDI ISRA [02:20:23]

Pertanyaan saya, ada laporan atau tidak?

1284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:24]

Temuan, Yang Mulia.

1285. KETUA: SALDI ISRA [02:20:25]

Oke.

1286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:26]

Temuan dari pengawas.

1287. KETUA: SALDI ISRA [02:20:28]

Oke, lanjut.

1288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:29]

Kemudian, di TPS 15 Kampung Lettu Idrus[sic!], Distrik Kaimana, ini Calon Bupati Pihak Terkait, Yang Mulia, atas nama Hasan Achmad dan istri, ini menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia. Padahal tadi kami sampaikan di awal, KTP-nya bukan KTP Kaimana, Yang Mulia.

1289. KETUA: SALDI ISRA [02:20:45]

Oke.

1290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:48]

Ini kami lampirkan bukti foto-fotonya dan juga beberapa bukti lainnya, Yang Mulia.

Kemudian, di TPS 1, Kampung Wosokuno, Distrik Yamor, ini seluruh surat suara dicoblos oleh Anggota KPPS dan atas pelanggaran ini memang ada rekomendasi untuk PSU, Yang Mulia, kami juga melampirkan bukti (...)

1291. KETUA: SALDI ISRA [02:20:48]

Dilaksanakan PSU atau tidak?

1292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:07]

Dilaksanakan tapi fiktif, Yang Mulia.

1293. KETUA: SALDI ISRA [02:21:10]

Oh, oke.

1294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:11]

Nanti kami ada beberapa pernyataan saksi-saksi. Jadi, dilakukan, seolah-olah dilakukan, tapi sebenarnya tidak, Yang Mulia.

1295. KETUA: SALDI ISRA [02:21:15]

Oke.

1296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:18]

Gitu, Yang Mulia.

Kemudian, di TPS 2 Kampung Trikora, Distrik Kaimana, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian, di TPS 12 Kampung Krooy, Kaimana, itu ada tiga lobang di surat suara namun dinyatakan sebagai surat suara sah.

Nah, selebihnya mungkin (...)

1297. KETUA: SALDI ISRA [02:21:37]

Kalau tiga lobang, itu dalam kotak yang sama kan, boleh?

1298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:40]

Ini di luar kotak itu, Yang Mulia, tapi dianggap sah (...)

1299. KETUA: SALDI ISRA [02:21:46]

Itu disertakan sebagai bukti, ya?

1300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:45]

Ya, kami sertakan sebagai bukti, kemudian (...)

1301. KETUA: SALDI ISRA [02:21:50]

Oke, ini semua yang detail-detail per TPS dianggap sudah dibacakan.

1302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:54]

Ya, ada dua lagi, Yang Mulia.

1303. KETUA: SALDI ISRA [02:21:55]

Ya.

1304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:21:55]

Yaitu terkait dengan adanya keberpihakan dewan adat. Jadi, ada isu SARA juga yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di distrik-distrik tertentu, Pemohon itu tidak bisa melakukan kampanye karena ada isu tersebut, Yang Mulia.

1305. KETUA: SALDI ISRA [02:23:13]

Isu SARA-nya apa?

1306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:23:14]

Mohon maaf, Yang Mulia?

1307. KETUA: SALDI ISRA [02:23:16]

Isu SARA-nya apa?

1308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:23:17]

Nah, ini orang asli Kaimana dan bukan orang asli Kaimana. Jadi, OAKA dan non OAKA.

1309. KETUA: SALDI ISRA [02:23:24]

Oke.

1310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:23:24]

Gitu, Yang Mulia, sehingga di beberapa distrik tidak bisa melakukan kampanye.

Terakhir, Yang Mulia, ada juga hoax[sic!], jadi ada pelanggaran hoax[sic!] yang disampaikan oleh ketua tim dari Pihak Terkait dan sudah jadi tersangka, ya, sudah naik di proses di Bawaslu dan sudah menjadi tersangka.

1311. KETUA: SALDI ISRA [02:23:43]

Oke.

1312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:23:43]

Itu saja, Yang Mulia.

1313. KETUA: SALDI ISRA [02:23:44]

Silakan lanjut ke Petitem.

1314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:23:45]

Kemudian, Petitem disampaikan oleh rekan kami, Yang Mulia.

1315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD MATDOAN [02:23:50]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

1316. KETUA: SALDI ISRA [02:22:52]

Walaikumsalam wr. wb.

1317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD MATDOAN [02:23:53]

Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Bupati, Calon Bupati Drs. Hasan Achmad M.Si. dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ... sebagai pasangan

calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.

4. Menyatakan batal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024.
6. Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024.

Atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan calon tunggal, yaitu Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada.
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilaksanakan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan ke KPU RI untuk mengganti seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih Bawaslu Kabupaten Kaimana menyelenggarakan pemungutan suara ulang tersebut.
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua maksudnya Papua Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq. Wassalamualaikum wr.wb.

1318. KETUA: SALDI ISRA [02:26:41]

Walaikumsalam wr. wb. Biar saya jawab juga begitu.
Pak Arsul, silakan.

1319. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini Saudara Pemohon, ya. Wallahul Muwafiq-nya mantap, fasih. NU ini pasti. Kalau Muhammadiyah kan wabillahi taufiq wal hidayah, tapi pas juga kalau Muhammadiyah di sini biasanya pakai Nasruminallah Wa Fathun Qarib begitu, ya.

Saya mau tanya, ini kan memang setelah Putusan MK Nomor 60 banyak, enggak banyaklah, ada beberapa kasus dimana partai politik yang tadinya sebelum putusan itu sudah memberikan surat pengusungan form KWK begitu, ya. Kemudian setelah ada putusan, kemudian berpindah hati, kan begitu. Karena ambang batasnya kan menurun berdasarkan putusan MK Nomor 60/2020[sic!].

Pertanyaan saya surat dukungan PAN itu ya, diberikan ya, apakah sebelum atau setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 60 itu tadi? Coba, tanggal[sic!] berapa?

1320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:28:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi sebagaimana kami sampaikan untuk Putusan MK sendiri itu kan tanggal 20 Agustus (...)

1321. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:00]

Ya.

1322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:28:15]

Kebetulan kami menjadi salah satu kuasanya juga di situnya, Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas).

1323. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:15]

Ya.

1324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:28:15]

Kemudian PAN, termasuk gabungan koalisi ini, waktu itu mengajukan pencalonan itu tanggal 27 Agustus (...)

1325. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:28]

Bukan, putusan pengusungan KW ... tanda tangan dari PAN-nya, bukan mengajukan pengusungannya karena ada partai yang dari awal, ya, sudah memberikan, memang mau mengusung, meskipun ... apa ... pencalonannya atau pendaftaran calonnya itu masih lama, ya. Tapi sudah dari awal 2-3 bulan sebelumnya sudah memberikan, pertanyaan saya itu tadi, ya.

Suratnya, bukan pendaftaran calonnya, suratnya PAN itu pengusungannya, ya, setelah atau sebelum?

1326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:01]

Itu tanggal 15 Agustus, Yang Mulia, 2024. Nah (...)

1327. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:01]

Ya.

1328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:05]

Kemudian di tanggal 27 itu sebelum pendaftaran karena pendaftaran tanggal 29 Agustus, Yang Mulia.

1329. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:05]

Ya.

1330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:05]

Nah, di 27 Agustus itu masih ikut bersama parpol-parpol lain untuk kemudian mengajukan penandatanganan pencalonan.

1331. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:12]

Pencalonan?

1332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:12]

Pencalonan.

1333. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:15]

Ya, itu setelah pencalonan, baru (...)

1334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:18]

Ya.

1335. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:19]

Kemudian dia mencabut.

1336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:28]

Setelah pencalonan tanggal 2 September 2024, kemudian mencabut, Yang Mulia.

1337. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:33]

Nah, yang kedua, atas pencabutan ini, apa upaya yang sudah dilakukan oleh paslon Saudara?

1338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:39]

Kami, sebenarnya sudah mengajukan sengketa proses, Yang Mulia, ke Bawaslu, sampai juga TUN sampai Mahkamah Agung, Yang Mulia.

1339. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:45]

Oke.

1340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:47]

Hanya saja.

1341. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:47]

Apa putusannya?

1342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:47]

Putusannya di NO, Yang Mulia. Karena hampir di seluruh Indonesia sepertinya seperti itu, Yang Mulia. Karena dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan.

1343. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:57]

Oh, begitu, dianggap tidak memiliki legal standing?

1344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:29:57]

Tidak memiliki legal standing?

1345. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:01]

Kenapa tidak memiliki legal standingnya?

1346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:30:03]

Karena dianggap tidak terdampak langsung, Yang Mulia. Karena kita kan men-challenge penetapan pasangan calon lain. Nah, itu terjadi di hampir mungkin di seluruhnya sengketa, Yang Mulia.

1347. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:15]

Baik, ya. Terima kasih, Pemohon. Maka kami yang akan menilai (...)

1348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:30:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

1349. KETUA: SALDI ISRA KUASA [02:30:21]

Terima kasih. Yang Mulia, Pak Ridwan.

1350. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:30:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, ini kan Petitumnya ini alternatif, ya. Nah, coba dilihat ... di apa ... di butir ke 5 dan juga ke 4 itu di Petitum Saudara. Ini kan menyatakan batal Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Beserta Pemilihan Bupati, beserta lampirannya, begitu juga yang sebelumnya Nomor 4 itu.

Nah, kalau ini sudah dibatalkan, bukankah ... apa tidak ada peserta, kemudian termasuk juga peserta yang ... apa ... menjadi Pemohon di sini. Coba nanti dipikirkan itu, kalau seandainya terus ke pembuktian atau ada jawaban?

1351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:31:17]

Baik, Yang Mulia. Jadi memang ini harusnya ada *sepanjang* tadi itu, Yang Mulia.

1352. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:31:24]

Ya, baik, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

1353. KETUA: SALDI ISRA KUASA [02:31:27]

Terima kasih. Kita masuk ke nomor terakhir hari ini dari Kabupaten Yalimo Nomor 275.

Saya kalau ketemu 275 itu, saya itu senang sekali dengan angkanya ini, Pak. Angka 275 ini nomor buku pokok saya ketika kuliah S1 dulu, selalu hafal oleh saya sampai sekarang. Jadi kalau ada 275, wah ini sama dengan nomor buku pokok saya. Silakan, Pak.

1354. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:31:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Karena dari semua persidangan, ini yang menarik Bapak, 275.

1355. KETUA: SALDI ISRA [02:32:02]

Ya.

1356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:32:04]

Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi tanda-tanda alam.

1357. KETUA: SALDI ISRA [02:32:12]

Saya sudah percaya Bapak akan menjawab seperti itu tadi.

1358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:32:11]

Ya, kebetulan dari 11 yang hadir di persidangan saat ini, kamilah satu-satunya yang didampingi oleh (...)

1359. KETUA: SALDI ISRA [02:32:24]

Prinsipal.

1360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:32:24]

Prinsipal, langsung.

1361. KETUA: SALDI ISRA [02:32:]

Silahkan, Pak.

1362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:32:00]

Ya, terima kasih.

Baik, perkenalkan saya, Pither Ponda Barany, S.H., dari Kantor Advokat Koteka. Bersama rekan saya, keterbatasan[sic!] Yance Tenouye[sic!], didampingi oleh Prinsipal kami, Bapak Alexander Walilo, Calon Bupati Yalimo, Nomor Urut 2. Dan kami juga bertindak atas nama Calon Wakil Bupati Ahim Helakombo.

1363. KETUA: SALDI ISRA [02:33:11]

Silakan, lanjut.

1364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:11]

Ya, kami anggap dibacakan saja mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1365. KETUA: SALDI ISRA [02:33:17]

Ya.

1366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:18]

Tenggang waktu juga.

1367. KETUA: SALDI ISRA [02:33:23]

Oke.

1368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:25]

Kedudukan juga, kami anggap dibacakan saja, Majelis.

1369. KETUA: SALDI ISRA [02:33:25]

Ya.

1370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:25]

Daripada kita berpanjang-panjang, kami mau masuk pada Pokok Permohonan.

1371. KETUA: SALDI ISRA [02:33:30]

Ya.

1372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:30]

Pokok permohonan ini (...)

1373. KETUA: SALDI ISRA [02:33:33]

Ini 3 Pasangan Calon ya di sini?

1374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:34]

3, Majelis.

1375. KETUA: SALDI ISRA [02:33:37]

Oke.

1376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:37]

Ya.

1377. KETUA: SALDI ISRA [02:33:38]

Peraih suara terbanyaknya Nomor 1, ya?

1378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:41]

Peraih suara terbanyak menurut KPU.

1379. KETUA: SALDI ISRA [02:33:45]

Ya.

1380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:45]

Nomor 1=36.912.

1381. KETUA: SALDI ISRA [02:33:48]

Oke.

1382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:48]

Nomor 2, Alexander Walilo=34.525.

1383. KETUA: SALDI ISRA [02:33:56]

Ya, kemudian.

1384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:33:56]

Nomor 3, Marthen Yohama=17.373.

1385. KETUA: SALDI ISRA [02:33:58]

Oke.

1386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:34:00]

Itu menurut KPU. Tapi menurut perhitungan kami, setelah meng-cross-check semua bukti yang ada pada kami, Majelis.

1387. KETUA: SALDI ISRA [02:34:09]

Ya.

1388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:34:09]

Nahor tercatat memperoleh suara 5.338. Yang benar menurut kami 5.338 juga.

1389. KETUA: SALDI ISRA [02:34:17]

Oke.

1390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:34:17]

Alexander Walilo, S.Sos. memperoleh 1.915, kami juga membenarkan 1.915. Marthen Yohama 5.938, dan itu juga kami benarkan 5.938. Sehingga di Distrik Elelim benar perhitungannya.

1391. KETUA: SALDI ISRA [02:35:48]

Oke.

1392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:35:48]

Selanjutnya, di Distrik Abenaho. Di Distrik Abenaho, Termohon menghitung suara 01 Nahor, 17.062.

1393. KETUA: SALDI ISRA [02:36:02]

Ya.

1394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:36:02]

Yang benar, menurut perhitungan kami, 16.954.

Nomor 2, Alexsander Walilo. Menurut Termohon, hitungannya 9.065, menurut kami 9.225.

Nomor 3, Marthen Yohama. Menurut Termohon memperoleh 4.069. Yang menurut kami 4.069, jadi sama.

1395. KETUA: SALDI ISRA [02:36:44]

Oke.

1396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:36:47]

Untuk distrik Apalapsili, Termohon menghitung perolehan suara Nahor 992. Yang benar, menurut kami adalah 85 suara.

1397. KETUA: SALDI ISRA [02:36:58]

Oke.

1398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:05]

Nomor 2, Alexsander Walilo. Menurut Termohon, 11.350. Menurut kami yang benar adalah 12.257.

1399. KETUA: SALDI ISRA [02:37:21]

Oke.

1400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:23]

Nomor 3, Marthen Yohama. Menurut Termohon dan kami, sama-sama 0.

1401. KETUA: SALDI ISRA [02:37:33]

Itu soal suara, ya?

1402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:34]

Ya, soal suara, Majelis.

1403. KETUA: SALDI ISRA [02:37:35]

Sekarang ini penyalahgunaan wewenang oleh calon Petahana.

1404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:39]

Ya, masih ada 2 distrik.

1405. KETUA: SALDI ISRA [02:37:41]

Lanjut!

1406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:41]

Majelis, kami tuntaskan dulu.

1407. KETUA: SALDI ISRA [02:37:43]

Distrik berapa lagi? Ini sudah selesai kan?

1408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:46]

Distrik Walarek.

1409. KETUA: SALDI ISRA [02:37:47]

Sebentar.

1410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:48]

Di belakangnya, Majelis, 3.4.

1411. KETUA: SALDI ISRA [02:37:51]

3.4.

1412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:37:54]

Ya, di situ terjadi perubahan.

1413. KETUA: SALDI ISRA [02:37:57]

Walarek. Sebentar, Pak, saya lihat. Tidak ada di sini. Oke, silakan.

1414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:38:15]

Ya, di Distrik Walarek. Menurut Termohon, Calon Nomor 1 memperoleh 8.042. Menurut kami hanya 8.170.

1415. KETUA: SALDI ISRA [02:38:26]

Oke.

1416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:38:36]

Calon Nomor 2, Alexsander, menurut Termohon 8.370. Menurut kami 8.570.

Nomor 3, Marthen Yohama, menurut Termohon 5.796. Dan menurut kami juga 5.796.

1417. KETUA: SALDI ISRA [02:38:56]

Oke. Terus?

1418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:39:06]

Di Benawa, sama Majelis.

1419. KETUA: SALDI ISRA [02:39:09]

Enggak ada perubahan Benawa, ya?

1420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:39:10]

Ya.

1421. KETUA: SALDI ISRA [02:39:11]

Oke, terus?

1422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:39:13]

Sehingga kami merekapitulasi dari perubahan-perubahan yang terjadi, total perolehan suara untuk Nahor Nomor Urut 1 adalah 35.647.

1423. KETUA: SALDI ISRA [02:39:21]

Oke.

1424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:39:32]

Untuk Calon Nomor 2=35.792. Dan Calon Nomor 3 memperoleh suara 17.371.

1425. KETUA: SALDI ISRA [02:39:41]

Oke, Lanjut!

1426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:39:57]

Pengalihan suara.

1427. KETUA: SALDI ISRA [02:40:00]

Waktunya 15 menit, Pak, ya.

1428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:40:02]

Ya (...)

1429. KETUA: SALDI ISRA [02:40:00]

Kita sudah sepakat ini.

1430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:40:03]

Oke.

1431. KETUA: SALDI ISRA [02:40:04]

Soal angka-angka kita anggap selesai. Masuk ke poin (...)

1432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:40:06]

Ya, kami anggap dibacakan saja, Majelis.

1433. KETUA: SALDI ISRA [02:40:09]

Langsung (...)

1434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:40:09]

Karena tabel, ya.

1435. KETUA: SALDI ISRA [02:40:09]

Ya.

1436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:40:12]

Penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana.

1437. KETUA: SALDI ISRA [02:40:17]

Oke.

1438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:40:17]

Pada tanggal 30 Agustus 2024, setelah mendaftar, petahana melakukan penggantian kepala desa dengan SK Keputusan Bupati Yalimo Nomor 188645/101/HKM/2024 tentang Plt Kepala Desa Kayo, Amuluk, Wassidik, Wasalongsili[*sic!*], dan selanjutnya. Demikian juga, mutasi atau Plt dikeluarkan untuk Kepala Distrik Welarek.

Hal lain yang terjadi adalah money politics.

1439. KETUA: SALDI ISRA [02:41:06]

Ya.

1440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:41:07]

Ini lengkap dengan video dan foto.

1441. KETUA: SALDI ISRA [02:41:11]

Ya.

1442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:41:12]

Di situ kami sudah lampirkan, Majelis.

1443. KETUA: SALDI ISRA [02:41:16]

Oke.

1444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:41:16]

Keterpihakan Pihak Pelaksana, panwas Kecamatan Welarek. Itu jelas kami sebutkan di dalam permohonan kami.

Juga keberpihakan karena tidak ... apa ... terdistribusinya atribut ke TPS. Di (...)

1445. KETUA: SALDI ISRA [02:41:49]

Apa lagi, Pak?

1446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:41:50]

Di Distrik Abenaho, Ketua PPD Sekretaris PPBD Abenaho dan Panwas di distrik Abenaho, Ketua Kor ... Korwil Anggota KPU Yalimo[*sic!*] Okniel Kiral, secara jelas mengalihkan suara, 160 suara dari Paslon 02 dialihkan kepada Paslon 01.

1447. KETUA: SALDI ISRA [02:42:15]

Oke.

1448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:16]

Itu, Majelis, dan yang menarik adalah pernyataan yang membuat masyarakat juga menjadi bertanya-tanya tentang Kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

1449. KETUA: SALDI ISRA [02:42:30]

Ya.

1450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:30]

Adalah pernyataan Nahor di depan masyarakat menyatakan bahwa suap Hakim MK Rp3 Miliar pada Pemilu yang lalu.

1451. KETUA: SALDI ISRA [02:42:40]

Pemilu yang lalu, itu pemilu yang mana nih, Pak?

1452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:42]

Dua ribu dua ... apa itu ... 2020 ... 20.

1453. KETUA: SALDI ISRA [02:42:46]

Itu ada bukti rekamannya?

1454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:49]

Ada.

1455. KETUA: SALDI ISRA [02:42:50]

Ada Ada diserahkan?

1456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:50]

Ada masuk.

1457. KETUA: SALDI ISRA [02:42:51]

Diserahkan, ya?

1458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:51]

Ya.

1459. KETUA: SALDI ISRA [02:42:53]

Jadi, bukan ... bukan Pilkada yang sekarang, ya? Tapi yang 2020?

1460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:56]

Bukan, yang lalu ... yang lalu karena (...)

1461. KETUA: SALDI ISRA [02:42:57]

Ada disebut nama hakimnya, enggak?

1462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:42:59]

Enggak ada.

1463. KETUA: SALDI ISRA [02:43:00]

Oh, oke.

1464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:01]

Enggak ada.

1465. KETUA: SALDI ISRA [02:43:01]

Jangan-jangan hakim garis yang dimaksud itu.

1466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:03]

Ya, kira-kira.

1467. KETUA: SALDI ISRA [02:43:08]

Nanti diserahkan, ya? Biar kita lihat juga.

1468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:10]

Ada, ya ... ada.

1469. KETUA: SALDI ISRA [02:43:10]

Siapa tahu kita bisa mengevaluasi ini.

1470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:12]

Ya.

1471. KETUA: SALDI ISRA [02:43:12]

Benar atau enggak ini? Lanjut.

1472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:15]

Ya, 5 distrik kronologis, saya anggap dibacakan saja, Majelis.

1473. KETUA: SALDI ISRA [02:43:21]

Ya, betul.

1474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:22]

Petitum kami (...)

1475. KETUA: SALDI ISRA [02:43:24]

Petitum.

1476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:24]

Pertama mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1477. KETUA: SALDI ISRA [02:43:29]

Ya.

1478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:30]

Kedua, membatalkan keputusan KPU dan seterusnya.

1479. KETUA: SALDI ISRA [02:43:33]

Ya.

1480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:33]

Ini sepanjang mengenai perolehan suara di TPS dan PPK.

1481. KETUA: SALDI ISRA [02:43:41]

Oke.

1482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:43:41]

Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024. Dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657/2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

1. Pasangan Nahor memperoleh suara=35.647.
 2. Pasangan Alex memperoleh suara=35.792.
 3. Pasangan Marthen Yohame Markus memperoleh suara=17.371.
- Total suara 88.810.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.
Demikian, Yang Mulia.

1483. KETUA: SALDI ISRA [02:44:59]

Cukup?

1484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:45:00]

Cukup.

1485. KETUA: SALDI ISRA [02:45:00]

Terima kasih. Ada yang mau dikomentari? Cukup.

Yang Mulia, Pak Ridwan? Cukup, ya.

Terima kasih, Bapak. Ini berarti sesi kita ini sudah selesai, sesi pagi. Nah, ini kami akan sahkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah terlebih dahulu. Sebelum nanti dibuka sesi kalau ada yang mau bertanya begitu. Tapi tentu harapan kami tidak bertanya, biar cepat selesai.

Ini untuk, Perkara Nomor 270, Timor Tengah Selatan, ya.

Oke, ada? Ada.

Oke ini pertama dari Perkara Nomor 270 ya Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17. Betul, ya?

1486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [02:47:18]

Betul, Yang Mulia.

1487. KETUA: SALDI ISRA [02:47:20]

Betul.

1488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIS ELVEN [02:47:21]

Benar, Yang Mulia.

1489. KETUA: SALDI ISRA [02:47:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian ini ada KTA yang habis masa berlaku, Anggi Alwik Juli Siregar, Darmawan Subakti.

Kemudian KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Dessy Widyawati dan Sapar Judi[sic!] telah habis masa berlaku, nanti tolong diserahkan yang barunya.

Nomor 12, Kabupaten Bireuen. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-315. Betul Bireuen? Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Karena lengkap, kemudian KTA atas nama Wahyu Pratama masa berlaku habis. Nanti tolong dilengkapi.

Perkara Nomor 29 Kabupaten Kampar. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39. Benar, ya?

Tapi ini ada beberapa catatan Bukti P-21 dan Bukti P-27 tidak terdapat bukti fisiknya, nanti tolong dilengkapi.

Bukti P-24 pada DAB tertulis daftar hadir pada TPS 01 sampai dengan TPS 17, namun tidak terdapat dokumen TPS 4, TPS 7, sampai TPS 17. Oke, itu bukti.

Kemudian, Bukti P-29A pada DAB tertulis daftar hadir pada TPS-01 sampai TPS-16, namun hanya terdapat dokumen TPS-6, TPS lain tidak ada. Dilengkapi, ya. Yang tidak bermasalah disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA habis 2024, M. Rais Hasan, Syamsuddin Slawat, P. Fakhry Firmanto, Trie Andu Pratikno ... Pratiknyo, Robert Meri, Usman, Harry Rizki P.P, Herianto Siregar, Gusti Randa, Fahmi Hanifah[sic!], Rudri Musdianto, Caesar Tio P., Yasril. Tidak tampak keterangan masa berlaku. Rico Febputra, Juhdi Permane[sic!], Ade Nurisman, Arlena[sic!] Sagita, Syamsul Ma'arif. Itu segera diperbaiki.

Perkara 158 Kabupaten Biak Numfor, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48. Betul? Ini yang tadi Putra Siliwangi, ya. Nah, itu lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

1490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [02:48:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1491. KETUA: SALDI ISRA [02:48:57]

Tapi KTA atas nama Heriyanto itu sudah habis masa berlakunya (...)

1492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZEVI [02:49:00]

Baik, Yang Mulia.

1493. KETUA: SALDI ISRA [02:49:03]

Tolong nanti diperbaiki.
Perkara Nomor 80 Kabupaten Buton Selatan.
Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25. Betul? Betul? Agak keras suaranya sedikit. Oke, disahkan lengkap.

KETUK PALU 1X

Tapi Surat Kuasa yang diserahkan dalam persidangan, terdapat Surat Kuasa tambahan yang diserahkan dalam persidangan, ya. Betul?

1494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [02:49:10]

Betul.

1495. KETUA: SALDI ISRA [02:49:12]

Oke. Semakin banyak lawyer, itu semakin kecil pembagiannya, jadi enggak usah banyak-banyak lawyernya. Karena kan pembagiannya makin besar kan, makin banyak begitu.

Nomor 134 Kabupaten Buton Selatan, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7. Benar, ya? Lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

140 Perkara Nomor 14 ... sorry ... 143, ini apanya, Nomor 143 Kabupaten Konawe Kepulauan, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-18.

1496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [02:49:22]

Betul, Yang Mulia.

1497. KETUA: SALDI ISRA [02:49:25]

Oke, lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian KTA expired atau sudah tidak berlaku lagi atas nama Muamar, Zubair, Mulyadi, Zamawi[sic!], Ari Arfan Hasibuan, Renaldy Permana. Sementara itu Alvi Zuhri Hasibuan tidak melampirkan KTA. Yang tidak melampirkan tolong dilengkapi.

1498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [02:49:35]

Baik, Yang Mulia.

1499. KETUA: SALDI ISRA [02:49:37]

Catatan tambahan, softcopy Permohonan awal versi word diminta untuk disampaikan. Jadi ya (...)

1500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [02:49:39]

Baik, Yang Mulia.

1501. KETUA: SALDI ISRA [02:49:41]

Word yang Permohonan awal tolong disampaikan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Perkara 143.

1502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025: TONY AKBAR HASIBUAN [02:49:43]

Baik, Yang Mulia.

1503. KETUA: SALDI ISRA [02:49:45]

Berikut, Perkara 228 Kabupaten Pegunungan Bintang, memberikan Bukti atau menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-22.

1504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:47]

Benar, Yang Mulia.

1505. KETUA: SALDI ISRA [02:49:99]

Benar ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada catatan. Pegunungan Bintang 244, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11. Benar ya, ini ada catatan. Bukti P-6 pada DAB tertulis Desa Okhim pada bukti fisik tertulis Desa Okik, nanti diperbaiki. Disahkan yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum sudah tidak berlaku, yakni atas nama La Ode Muhram dan Muhammad Baidar Maulid.

Perkara 254 Kabupaten Kaimana menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66?

1506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:52:28]

Betul, Yang Mulia. Ada yang menyelip P-65 akan kami serahkan, Yang Mulia.

1507. KETUA: SALDI ISRA [02:52:32]

Ya, ini ... ini catatannya. Bukti P-65 belum diserahkan fisiknya, tolong diserahkan. Oke? Bukti P-1 sampai Bukti P-66 disahkan, kecuali 65.

1508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:52:45]

Kemudian, ada tambahan bukti, Yang Mulia.

1509. KETUA: SALDI ISRA [02:52:47]

Ya, nanti ditambahkan.

KETUK PALU 1X

Ini catatan, ini banyak sekali nih KTA yang sudah tidak berlaku. Ini komandan besarnya nih, R.A Made Damayanti Zoelva, nah itu. Sampaikan ke Ibu ini, jadi komandan itu harus memberikan contoh, begitu. Didi Supriyanto, Ahmad Waluya Muharam, Titin Fatimah, nah pokoknya semua yang ada di situ tuh, sudah expired.

1510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:53:13]

Siap, Yang Mulia.

1511. KETUA: SALDI ISRA [02:53:13]

Sebanyak itu pegang perkara, masa enggak bisa bayar iuran per-tahun itu.

1512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:53:19]

Sudah ada, Yang Mulia, sudah ada yang (...).

1513. KETUA: SALDI ISRA [02:53:21]

Sudah ada. Nanti diserahkan.
Terakhir 275, Kabupaten Yalimo.
Yang pertama, sebelum bukti, ya?

1514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:27]

Ya.

1515. KETUA: SALDI ISRA [02:53:29]

Tolong diserahkan softcopy file word, Permohonan awal, ya Pak, ya?

1516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:34]

Ya.

1517. KETUA: SALDI ISRA [02:53:37]

Diserahkan.
Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum sudah tidak berlaku atas nama Pither Ponda Barany.

1518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:43]

Sudah ada, Majelis.

1519. KETUA: SALDI ISRA [02:53:44]

Nah, nanti diserahkan.

1520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:44]

Ya.

1521. KETUA: SALDI ISRA [02:53:45]

Bukti, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41?

1522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:50]

Benar.

1523. KETUA: SALDI ISRA [02:53:52]

Benar, ini catatan. Bukti P-6 dan Bukti P-7, bukti fisik belum diserahkan.

1524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:57]

Sudah tadi.

1525. KETUA: SALDI ISRA [02:53:58]

Sudah, ya?

1526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:53:59]

Ya.

1527. KETUA: SALDI ISRA [02:53:58]

Nah, nanti dicek.

1528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:54:02]

Ya.

1529. KETUA: SALDI ISRA [02:54:02]

Diserahkan ke siapa, Pak?

1530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:54:06]

Di Panitera sebelum masuk sidang.

1531. KETUA: SALDI ISRA [02:54:09]

Oh, berarti belum sampai ke kami?

1532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:54:10]

Ya.

1533. KETUA: SALDI ISRA [02:54:11]

Ke ruang sidang. Nanti dicek, tapi penting ini ada catatan.
Bukti P-11, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-41 belum dileges.
Belum ada legesnya, Pak.

1534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:54:25]

P berapa, Majelis?

1535. KETUA: SALDI ISRA [02:54:26]

P-11, P-39 sampai dengan Bukti P-41, jadi ada empat bukti yang belum dileges. Nanti dileges, Pak, ya?

1536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025: PITHER PONDA BARANY [02:54:37]

Oh, rekaman video?

1537. KETUA: SALDI ISRA [02:54:38]

Nah, ya itu tetap harus dileges, Pak, nah itu. Supaya nanti orang kantor pos bisa lihat juga, ini videonya benar atau tidak ini, nah itu.

Kemudian Bukti P-12 tertulis pada DAB TPS 01 Pensale[sic!], bukti fisik tertulis Pengsale[sic!]. Nanti diperbaiki, Pak, ya, mana yang benar. Oke, yang tidak bermasalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Selesai urusan Pemohon, selesai.

Sekarang Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu ada yang mau mengajukan pertanyaan atau cukup?

1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:19]

Izin, Yang Mulia.

1539. KETUA: SALDI ISRA [02:55:19]

Oke, dari mana?

1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:20]

Izin.

1541. KETUA: SALDI ISRA [02:55:20]

Oke, silakan, dari mana perkara berapa ini?

**1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:23]**

Perkara Nomor 29, perkenalkan kami dari kuasa (...)

1543. KETUA: SALDI ISRA [02:55:28]

Kampar?

**1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:29]**

Kampar, Yang Mulia.

1545. KETUA: SALDI ISRA [02:55:30]

Ya, apa yang mau disampaikan?

**1546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:31]**

Kami hanya ingin mengajukan Permohonan inzage.

1547. KETUA: SALDI ISRA [02:55:34]

Nah, itu yang mau saya umumkan, nanti serentak umum semua.

1548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 29: MOH. FADLY [02:55:36]

Oh, siap.

1549. KETUA: SALDI ISRA [02:55:36]

Ya.

**1550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:37]**

Sekaligus juga kami menyampaikan akan menyerahkan kuasa tambahan, Yang Mulia.

1551. KETUA: SALDI ISRA [02:55:43]

Oke, nanti diserahkan. Apa lagi?

1552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. FADLY [02:55:46]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

1553. KETUA: SALDI ISRA [02:55:47]

Ada yang lain, ada? Diumumkan kalau ada yang mau inzage dipersilakan dengan mengajukan Permohonan, nanti akan di apa ... dilakukan di gedung 1, gedung utama di lantai dasar itu. Jadi, akan ada di situ panitia meja yang khusus melayani inzage, tapi itu waktunya terbatas, hanya di jam kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Cukup, ya? Tidak ada pertanyaan lain?

Bawaslu mana? Tolong dikasih mik. Silakan, Konawe Kepulauan.

1554. BAWASLU: IRMAWATI [02:56:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

1555. KETUA: SALDI ISRA [02:56:35]

Walaikumsalam wr.wb.

1556. BAWASLU: IRMAWATI [02:56:38]

Izin bertanya, Yang Mulia.

1557. KETUA: SALDI ISRA [02:56:39]

Ya.

1558. BAWASLU: IRMAWATI [02:56:40]

Terkait dalil di pelantikan 51 kepala desa tadi dibacakan bahwa peristiwanya itu terjadi di tanggal 23 November tahun 2023, sedangkan yang kami terima di file permohonannya itu tertanggal 23 November tahun 2024.

Saya ingin memperjelas, apakah kami mungkin yang salah memperoleh keterangan adanya perbaikan atau seperti apa? Saya mohon penjelasannya, Yang Mulia, terima kasih.

1559. KETUA: SALDI ISRA [02:57:10]

Ibu baca di permohonan tertulis, apa yang tertulis di situ, itu yang dijelaskan.

1560. BAWASLU: IRMAWATI [02:57:14]

Oh, ya.

1561. KETUA: SALDI ISRA [02:57:15]

Ya, Bu, ya.

1562. BAWASLU: IRMAWATI [02:57:15]

Ya.

1563. KETUA: SALDI ISRA [02:57:16]

Pokoknya Ibu pedomannya, kita semua pedomannya apa yang dituliskan. Oke?

1564. BAWASLU: IRMAWATI [02:57:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

1565. KETUA: SALDI ISRA [02:57:21]

Ya. Mungkin kalau ucapan lisan bisa saja keseleo kan, 2024 tersebut[sic!] 2023, makanya pedoman yang tertulis.

1566. BAWASLU: IRMAWATI [02:57:30]

Ya, Yang Mulia. Baik.

1567. KETUA: SALDI ISRA [02:57:31]

Oke. Terima kasih, Ibu. Ada lagi yang lain? Cukup.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu yang sudah mengikuti sidang kita dengan tertib sehingga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan suasana seperti ini bisa bertahan terus sampai nanti selesai persidangan kita di tahap berikutnya. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon untuk Perkara Nomor 12, 270, 29, 158, 80, 134, 143, 228, 244, 254, dan 275 untuk PPHU Bupati Tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB

Jakarta, 15 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

